



IPLM KOTA SEMARANG 2024

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KAJIAN PENGUKURAN

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) KOTA SEMARANG TAHUN 2024

**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KOTA SEMARANG**

Jl. Prof. Sudarto No. 116, Sumurboto, Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang, Jawa Tengah 50269

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4. Ruang Lingkup	I-4
BAB II	KAJIAN TEORI	II-1
	2.1. Pengertian Literasi	II-1
	2.2. Komponen Literasi	II-2
	2.3. Jenis Literasi	II-4
	2.4. Dimensi Literasi	II-6
	2.5. Manfaat Literasi	II-7
	2.6. Definisi Gerakan Literasi Nasional	II-8
	2.7. Prinsip Gerakan Literasi Nasional	II-8
	2.8. Macam-macam Gerakan Literasi Nasional	II-9
BAB III	METODE PENGUKURAN IPLM	III-1
	3.1. Pengertian Umum	III-1
	3.2. Rumus Indeks Pembangunan Literas Masyarakat (IPLM)	III-2
	3.3. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM)	III-4
	3.4. Aspek Masyarakat	III-12
	3.5. Angka Pembagi Rasio Kota	III-13
	3.6. Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan	III-13
	3.7. Tingkat skor IPLM	III-14
	3.8. Rumus IPLM	III-15
BAB IV	HASIL PENGUKURAN IPLM	IV-1
	4.1. Data Dasar Penghitungan IPLM	IV-1
	4.2. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM-1)	IV-2
	4.3. Tingkat Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM-2).....	IV-6
	4.4. Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM-3)	IV-16
	4.5. Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari (UPLM-4).....	IV-22
	4.6. Rasio Perpustakaan yang Dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (UPLM-5)	IV-27
	4.7. Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM-6)	IV-38
	4.8. Rasio Anggota Perpustakaan (UPLM-7)	IV-41
	4.9. Hasil IPLM Kota Semarang	IV-43
BAB V	SIMPULAN DAN REKOMENDASI	V-1
	5.1. Simpulan	V-1
	5.2. Rekomendasi	V-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kecakapan literasi Tahap Pembiasaan	II-12
Tabel 2.2	Kecakapan literasi Tahap Pengembangan	II-15
Tabel 4.1	Dasar Penghitungan IPLM Kota Semarang	IV-1
Tabel 4.2	Jumlah Perpustakaan di Kota Semarang	IV-4
Tabel 4.3	Tingkat Ketersediaan Perpustakaan Kota Semarang	IV-6
Tabel 4.4.	Jumlah Koleksi Perpustakaan Kota Semarang	IV-13
Tabel 4.5.	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Kota Semarang.....	IV-14
Tabel 4.6.	Jumlah Tenaga Perpustakaan Kota Semarang	IV-20
Tabel 4.7.	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan di Kota Semarang	IV-21
Tabel 4.8.	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Per Hari Kota Semarang	IV-25
Tabel 4.9.	Rasio Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari Kota Semarang	IV-27
Tabel 4.10.	Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP Kota Semarang ...	IV-39
Tabel 4.11.	Rasio Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP Kota Semarang	IV-40
Tabel 4.12.	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Sosialisasi Perpustakaan Kota Semarang	IV-41
Tabel 4.13.	Rasio Masyarakat yang Terlibat dalam Sosialisasi Perpustakaan Kota Semarang	IV-42
Tabel 4.14.	Jumlah Anggota Perpustakaan (Pemustaka Yang Terdaftar) Kota Semarang	IV-43
Tabel 4.15.	Rasio Anggota Perpustakaan (Pemustaka Yang Terdaftar) Kota Semarang	IV-44
Tabel 4.16.	Hasil Per hitungan IPLM Kota Semarang	IV-45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pembobotan Per Jenis Perpustakaan	III-3
Gambar 3.2	Tujuh Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM)	III-4
Gambar 3.3	Tabel Aspek Masyarakat Berdasarkan Jenis Perpustakaannya	III-14
Gambar 3.4	Tingkatan Skor IPLM	III-16

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada konteks ini, maka masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses ke perpustakaan dan layanannya, serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya.

Selaras dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perpustakaan telah menjadi urusan pemerintah daerah. Dalam upaya merealisasikannya maka diperlukan formulasi kebijakan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan serta pengembangan dan pembinaan perpustakaan di wilayah Kota Semarang, khususnya terkait dengan adanya ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan baik pada aspek koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, gedung, hingga pelayanan pemustaka. Dengan demikian, disparitas pembangunan dapat diminimalisir serta sebaran perpustakaan dapat berkeadilan di Kota Semarang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk:

1. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
3. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan

- sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 5. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 6. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Pemerintah pusat melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IPLM menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Semarang agar dapat diketahui kondisi mengenai jenis perpustakaan baik pada aspek koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, gedung, hingga pelayanan pustaka. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Semarang.

1.2. Dasar Hukum

Regulasi yang melandasi pekerjaan Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan ;
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kajian Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yaitu untuk mengetahui kondisi setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kota Semarang.

Tujuan Kajian Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Memetakan kondisi dan perkembangan pencapaian komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat di Kota Semarang, meliputi: pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per- hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, jumlah anggota perpustakaan.
2. Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan capaian IPLM di Kota Semarang.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kajian Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah:

1. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kota Semarang.
2. Melakukan pengukuran dan analisis pencapaian komponen pembentuk Indeks Pembangun Literasi Masyarakat di Kota Semarang, meliputi yang meliputi pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga

perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per- hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, jumlah anggota perpustakaan.

3. Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan capaian Indeks Pembangun Literasi Masyarakat di Kota Semarang.

2.1. Pengertian Literasi

Secara etimologis literasi berasal dari bahasa *littera* yang memiliki pengertian sistem tulisan yang menyertai. Literasi adalah hak asasi yang fundamental dan pondasi untuk belajar sepanjang hayat. Hal ini penting sepenuhnya untuk pembangunan sosial dan manusia dalam kemampuannya untuk mengubah kehidupan.¹

Tertuang dalam Undang-undang No.3 Tahun 2017 dibahas tentang Sistem perbukuan literasi “kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.”²

Arti literasi dalam arti sempit, menurut Alberta bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis namun menambah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.³

Menurut Kern dan Robinson, sebagaimana dikutip oleh Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf, literasi secara sempit didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, termasuk didalamnya pembiasaan membaca dan mengapresiasi karya sastra serta melakukan penilaian terhadapnya. Sedangkan secara luas, Kern mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk berpikir dan belajar seumur hidup untuk bertahan dalam lingkungan sosial dan budaya. Kern dan Robinson menyatakan bahwa literasi merupakan suatu media bagi individu agar

¹ Ibadullah Malawi, Dewi Tryanasari, and Apri Kartikasari, *Pembelajaran Literasi Berbasis Sastra Lokal* (Magetan : Cv. Ae Media Grafika, 2017). h.6

² Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018. h.7

³ Akhir Dunia Barat, “Strategi Pelestarian Budaya Melalui Gerakan Literasi Sekolah,” 2017. h.66

mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya terutama yang berkaitan dengan kemampuan menulis.⁴

Pengertian Literasi menurut UNESCO adalah wujud dari keterampilan yang secara nyata, yang secara spesifik adalah keteampilan kognitif dari membaca serta menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi seseorang tentang makna literasi itu sendiri adalah penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan juga pengalaman.⁵

Menurut Kern terdapat tujuh prinsip pendidikan literasi, yaitu :⁶

- (1) literasi melibatkan interpretasi Penulis/ pembicara dan pembaca/ pendengar berpartisipasi dalam tindak interpretasi;
- (2) literasi melibatkan kolaborasi.
- (3) literasi melibatkan konvensi.
- (4) literasi melibatkan pengetahuan cultural.
- (5) literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri.
- (6) literasi tidaklah sebatas pada sistem-sistem bahasa (lisan/ tertulis)

2.2. Komponen Literasi

Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf), menjabarkan komponen literasi sebagai berikut :

1. Literasi Dasar (*Basic Literacy*), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara,

⁴ Abu Maskur, "Penguatan Budaya Literasi Di Pesantren," *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (2019): h. 1–16

⁵ Purwati, S. (2017). Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Pelajaran Dimulai Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Membaca Dan Menghafal Surah Pendek. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, Dan Humaniora*, 3(4), 663–670

⁶ Kern, R. (2000). *Literacy and Language Teaching*. Oxford: Oxford University

membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

2. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*), yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa mengoptimalkan Literasi Perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada dasarnya literasi perpustakaan, antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
3. Literasi Media (*Media Literacy*), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Secara gamblang saat ini bisa dilihat di masyarakat adalah media lebih sebagai hiburan semata, belum memanfaatkan media sebagai alat untuk pemenuhan informasi tentang pengetahuan dan memberikan persepsi positif dalam menambah pengetahuan.
4. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (*Computer Literacy*) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan

komputer, menyimpan dan mengelola data, serta menjalankan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.

5. Literasi Visual (*Visual Literacy*), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat.

2.3. Jenis Literasi

Ada Sembilan (9) jenis literasi yaitu sebagai berikut : ⁷

1. Literasi Kesehatan merupakan kemampuan untuk memperoleh, mengolah serta memahami informasi dasar mengenai kesehatan serta layanan- layanan apa saja yang diperlukan di dalam membuat keputusan kesehatan yang tepat.
2. Literasi Finansial yakni kemampuan di dalam membuat penilaian terhadap informasi serta keputusan yang efektif pada penggunaan dan juga pengelolaan uang, dimana kemampuan yang dimaksud mencakup berbagai hal yang ada kaitannya dengan bidang keuangan.
3. Literasi Digital merupakan kemampuan dasar secara teknis untuk menjalankan komputer serta internet, yang ditambah dengan memahami serta mampu berpikir kritis dan juga melakukan evaluasi pada media digital dan bisa merancang konten komunikasi.
4. Literasi Data merupakan kemampuan untuk mendapatkan informasi dari data, lebih tepatnya kemampuan untuk memahami kompleksitas analisis data.

⁷ Setyawan, Ibnu Aji. 2018. Kupas Tuntas Jenis dan Pengertian Literasi. Online:gurudigital.id

5. Literasi Kritis merupakan suatu pendekatan instruksional yang menganjurkan untuk adopsi perspektif secara kritis terhadap teks, atau dengan kata lain, jenis literasi yang satu ini bisa kita pahami sebagai kemampuan untuk mendorong para pembaca supaya bisa aktif menganalisis teks dan juga mengungkapkan pesan yang menjadi dasar argumentasi teks.
6. Literasi Visual adalah kemampuan untuk menafsirkan, menciptakan dan menegosiasikan makna dari informasi yang berbentuk gambar visual. Literasi visual bisa juga kita artikan sebagai kemampuan dasar di dalam menginterpretasikan teks yang tertulis menjadi interpretasi dengan produk desain visual seperti video atau gambar
7. Literasi Teknologi adalah kemampuan seseorang untuk bekerja secara independen maupun bekerjasama dengan orang lain secara efektif, penuh tanggung jawab dan tepat dengan menggunakan instrumen teknologi untuk mendapat, mengelola, kemudian mengintegrasikan, mengevaluasi, membuat serta mengkomunikasikan informasi.
8. Literasi Statistik adalah kemampuan untuk memahami statistik. Pemahaman mengenai ini memang diperlukan oleh masyarakat supaya bisa memahami materi-materi yang dipublikasikan oleh media.
9. Literasi Informasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di dalam mengenali kapanakah suatu informasi diperlukan dan kemampuan untuk menemukan serta mengevaluasi, kemudian menggunakannya secara efektif dan mampu mengkomunikasikan informasi yang dimaksud dalam berbagai format yang jelas dan mudah dipahami.

2.4. Dimensi Literasi

Pada buku Panduan Gerakan Literasi Nasional (Kemendikbud 2017) menyatakan bahwa ada 6 (enam) dimensi literasi, yaitu: ⁸

- a. Literasi Baca dan Tulis, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
- b. Literasi Numerasi, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk (a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; (b) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.
- c. Literasi Sains, yaitu pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.
- d. Literasi Digital, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina

⁸ Luh Anik Mayani ed, *Panduan Gerakan Literasi Nasional* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 7.

komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

- e. Literasi Finansial, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko, (b) keterampilan, dan (c) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.
- f. Literasi Budaya dan Kewargaan, yaitu pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

2.5. Manfaat Literasi

Ada 9 Manfaat dari literasi yaitu (Sumiati dan Wijonarko, 2020 : 70) menyatakan bahwa ada sembilan manfaat dari literasi, yaitu:

- 1) Memasukkan kata atau frase baru ke dalam repertoar seseorang.
- 2) Meningkatkan fungsi otak karena membaca dan menulis seringkali memerlukannya.
- 3) Perluas pengetahuan Anda dan dapatkan perspektif segar.
- 4) Kemampuan Anda untuk berinteraksi dengan orang lain akan meningkat.
- 5) Kemampuan memahami informasi akan meningkat.
- 6) Kembangkan keterampilan Anda dalam ekspresi lisan.
- 7) Kembangkan kapasitas Anda untuk menganalisis dan berpikir kritis.
- 8) Berkontribusi pada peningkatan tingkat perhatian dan konsentrasi.
- 9) Meningkatkan kemampuan seseorang dalam menulis dan menghasilkan kalimat dan kata yang bermakna.

2.6. Definisi Gerakan Literasi Nasional

Gerakan Literasi Nasional merupakan sebuah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 melalui keterlibatan dan partisipasi seluruh warga negara Indonesia. Gerakan Literasi Nasional mengembangkan enam jenis literasi yang dibutuhkan untuk hidup pada abad ke-21. Keenam jenis literasi itu adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi kewargaan. Sebagai sebuah gerakan, keenam jenis literasi ini dikembangkan melalui tiga ranah, yaitu keluarga (Gerakan Literasi Keluarga), sekolah (Gerakan Literasi Sekolah), dan masyarakat (Gerakan Literasi Masyarakat).

Tujuan umum Gerakan Literasi Nasional adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.⁹

2.7. Prinsip Gerakan Literasi Nasional

Gerakan literasi dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Berkesinambungan

Sebagai suatu gerakan, literasi harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, tidak bergantung pada pergantian pemerintahan. Literasi harus menjadi program prioritas pemerintah yang selalu dikampanyekan kepada seluruh lapisan masyarakat, pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekia, remaja, orang tua, dan warga masyarakat sehingga budaya literasi terbentuk di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

⁹ Doni Koesoema A. *"Pedoman dan Penilaian Gerakan Literasi Nasional"*. (Kemendikbud: Jakarta, 2017)

2. Terintegrasi

Pelaksanaan literasi harus terintegrasi dengan program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan kementerian dan/atau lembaga lain, termasuk nonpemerintah. Dengan demikian, literasi menjadi bagian yang saling menguatkan dengan program lain.

3. Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan

Sebagai suatu gerakan, literasi harus memberikan kesempatan dan peluang untuk keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik secara individual maupun kelembagaan. Literasi harus menjadi milik bersama, menyenangkan, dan mudah dilaksanakan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

2.8. Macam-Macam Gerakan Literasi Nasional

Gerakan Literasi Nasional yang menjadi terobosan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan literasi dilakukan secara masif dalam tiga ranah, baik dalam ranah sekolah, ranah keluarga dan ranah masyarakat. Berikut penjelasan tiga ranah dalam Gerakan Literasi Nasional.¹⁰

1. Gerakan Literasi Sekolah

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta orang tua. GLS dilakukan dengan menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadikannya sebagai kebiasaan serta budaya di lingkungan sekolah. Literasi juga dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua rangkaian kegiatan siswa dan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas. Pendidik dan tenaga kependidikan tentu memiliki kewajiban moral sebagai teladan dalam hal berliterasi. Agar lebih

¹⁰ Dewi Utama Faizah, dkk., *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar* (Jakarta:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 21

masif, program GLS melibatkan partisipasi publik, seperti pegiat literasi, orang tua, tokoh masyarakat, dan profesional. Keberhasilan berliterasi di sekolah perlu diupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan budaya literasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada lima aspek strategi yang sudah ditetapkan.

a. Penguatan Kapasitas Fasilitator.

- 1) Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan literasi pada pembelajaran;
- 2) Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam pembuatan mainan edukatif berbasis literasi; dan
- 3) Forum diskusi bagi warga sekolah untuk mengembangkan kegiatan literasi dan meningkatkan kemampuan berliterasi;
- 4) Peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu;
- 5) Penyediaan bahan bacaan nonpelajaran yang beragam;
- 6) Penyediaan alat peraga dan mainan edukatif yang mendukung kegiatan literasi;
- 7) Penyediaan bahan belajar literasi dalam bentuk digital;
- 8) Program menulis buku bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

b. Perluasan Akses terhadap Sumber Belajar dan Cakupan Peserta Belajar

- 1) Pengembangan sarana penunjang yang membentuk ekosistem kaya literasi;
- 2) Penyediaan laboratorium yang berkaitan dengan literasi, misalnya, laboratorium bahasa, sains, finansial, dan digital;
- 3) Penyediaan pojok baca, baik di tiap kelas maupun di tempat-tempat strategis di sekolah;
- 4) Pengoptimalan perpustakaan sekolah;
- 5) Penyelenggaraan *open house* oleh sekolah yang

- sudah mengembangkan literasi;
- 6) Program pengimbasan sekolah; dan
 - 7) Pelaksanaan kampanye literasi.
- c. Peningkatan Pelibatan Publik
- 1) Pelaksanaan sesi diskusi dengan tokoh atau pegiat berbagai bidang literasi mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka terkait dengan bidang yang mereka kuasai;
 - 2) Pelaksanaan festival atau bulan literasi yang melibatkan pakar, pegiat literasi, dan masyarakat umum; dan
 - 3) Pelibatan BUMN dan DUDI dalam pengadaan bahan bacaan dan kegiatan literasi di sekolah.
- d. Penguatan Tata Kelola
- 1) Pengalokasian waktu atau jadwal khusus untuk melakukan berbagai kegiatan literasi di sekolah;
 - 2) Pengalokasian anggaran untuk mendukung literasi di sekolah;
 - 3) Pembentukan tim literasi sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, pengawas, guru, dan wakil orang tua peserta didik dengan tugas memantau berjalannya kegiatan-kegiatan literasi di sekolah;
 - 4) Pembuatan kebijakan yang mengatur kegiatan literasi di sekolah sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan semua warga sekolah; dan
 - 5) Penguatan peran komite sekolah untuk membangun relasi kerjasama dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan literasi.

Dalam pelaksanaan gerakan literasi nasional (GLN) terdapat tiga tahapan yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, tahap pembelajaran. Berikut penjelasan dari ketiga tahapan tersebut.

1. Tahap Pembiasaan

Tahap pembiasaan yaitu segala bentuk yang dilakukan oleh sekolah maupun guru dalam membiasakan siswa untuk belajar literasi.

Tabel 2.1.
Kecakapan literasi Tahap Pembiasaan

Jenjang	Komunikasi	Berpikir kritis
SD Kelas Rendah	Mengartikulasikan empati terhadap tokoh cerita	Memisahkan fakta dengan fiksi
SD Kelas Tinggi	Mempresentasikan cerita dengan efektif.	Mengetahui jenis tulisan dalam media dan tujuannya.

Tahap pembiasaan dilakukan antara lain :

- a. Membaca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai
Membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai menjadi sarana pembiasaan untuk menumbuhkan literasi membaca kepada siswa. Buku yang dibaca yaitu buku pelajaran maupun non pelajaran. Membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai bisa dilakukan dengan membaca nyaring maupun membaca didalam hati.
- b. Menata sarana dan lingkungan kaya literasi
Menata sarana dan lingkungan kaya literasi sangat membantu untuk membentuk generasi yang suka membaca. Sarana dan lingkungan tersebut yaitu perpustakaan, buku, sudut baca kelas, kantin, UKS, dan lain-lain.
- c. Menciptakan lingkungan kaya teks
Menciptakan lingkungan kaya teks bisa meningkatkan keinginan siswa dalam berliterasi. Menciptakan lingkungan kaya teks dapat dilakukan dengan menempelkan label, kata-kata motivasi,

poster, peraturan kelas, dan lain-lain. Dengan lingkungan kaya teks dapat membantu siswa dalam memberkaya kata yang telah dimiliki.

d. Memilih buku bacaan di SD

Memilih buku bacaan untuk siswa SD harus sesuai dengan karakter siswa sekolah dasar. Siswa membaca buku yang sudah disediakan oleh sekolah maupun buku yang sudah dibawa dari rumah untuk dibaca. Pada usia ini, anak usia sekolah dasar lebih menyukai buku-buku sains atau lingkungan sekitarnya. Buku-buku nonfiksi dengan gambar ilustrasi yang menarik juga sangat disenangi oleh anak-anak usia sekolah dasar.

Untuk mengetahui prioritas kegiatan di tahap pembiasaan literasi sudah dilaksanakan di sekolah apabila telah melaksanakan semua indikator dalam tahap pembiasaan. Indikator pencapaian pada tahap pembiasaan yaitu :

- 1) Ada kegiatan 15 menit membaca;
- 2) Kegiatan 15 menit membaca dilakukan setiap hari (di awal, tengah, atau menjelang akhir pelajaran);
- 3) Buku yang dibacakan atau dibaca oleh peserta didik dicatat judul dan nama pengarangnya dalam catatan harian;
- 4) Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lain terlibat dalam kegiatan 15 menit dengan membacakan buku atau ikut membaca dalam hati.

- 5) Ada perpustakaan sekolah atau ruang khusus untuk menyimpan buku non-pelajaran;
- 6) Ada sudut baca kelas di tiap kelas dengan koleksi buku non-pelajaran ;
- 7) Ada poster-poster kampanye membaca di kelas, koridor, dan area sekolah lainnya ;
- 8) Ada bahan kaya teks di tiap kelas.
- 9) Kebun sekolah, kantin, dan UKS menjadi lingkungan yang kaya literasi. Terdapat poster-poster tentang pembiasaan hidup sehat, kebersihan, dan keindahan di kebun sekolah, kantin, dan UKS. Makanan di kantin sekolah diolah dengan bersih dan sehat.

Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, alumni, dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah.

2. Tahap pengembangan

Pada tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca siswa.

Dalam tahapan ini, siswa akan dituntun untuk melakukan pengembangan kecakapannya dalam literasi melalui kegiatan nonakademis. Hal ini bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan

menangkap bacaan yang telah dilakukan yang kemudian mengkaitkan dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis dan mengelola potensi komunikasi secara kreatif.

Tabel 2.2.
Kecakapan literasi Tahap Pengembangan

Jenjang	Menyimak	Membaca	Berbicara	Menulis	Memilah Informasi
SD Kelas Rendah	Menyimak cerita untuk menumbuhkan empati	Mengeja kalimat dan memahami kata-kata Membaca gambar untuk memahami	Menjawab pertanyaan tentang tokoh cerita dan kejadian dalam cerita	Bercerita melalui gambar atau kata atau kalimat sederhana	Mengidentifikasi tokoh utama dan alur cerita sederhana
SD Kelas Tinggi	Menyimak cerita untuk menumbuhkan empati	Membaca cerita dengan fasih Menggunakan konteks kalimat untuk memaknai kata-kata baru Memahami cerita fantasi dan cerita rakyat dalam konteks budaya dan spesifik	Menceritakan ulang isi cerita dengan bahasa sendiri dan mengemukakan pendapat terhadap cerita	Menuliskan tanggapan terhadap tokoh/ alur cerita Menulis modifikasi cerita dalam alur awal tengah akhir cerita	Mengidentifikasi elemen fakta dan fiksi dalam cerita Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakter tokoh-tokoh cerita

Menciptakan lingkungan kaya teks bisa meningkatkan keinginan siswa dalam berliterasi. Menciptakan lingkungan kaya teks dapat dilakukan dengan menempelkan label, kata-kata motivasi, poster, peraturan kelas, dan lain-lain. Dengan lingkungan kaya teks dapat membantu siswa dalam memberkaya kata yang telah dimiliki.

a. Memilih buku bacaan di SD

Memilih buku bacaan untuk siswa SD harus sesuai dengan karakter siswa sekolah dasar. Siswa membaca buku yang sudah disediakan oleh sekolah maupun buku yang sudah dibawa dari rumah untuk dibaca. Pada usia ini, anak usia sekolah dasar lebih menyukai buku-buku sains atau lingkungan sekitarnya. Buku-buku nonfiksi dengan gambar ilustrasi yang menarik juga sangat disenangi oleh anak-anak usia sekolah dasar.

Untuk mengetahui prioritas kegiatan di tahap pembiasaan literasi sudah dilaksanakan di sekolah apabila telah melaksanakan semua indikator dalam tahap pembiasaan. Indikator pencapaian pada tahap pembiasaan yaitu:

- 1) Ada kegiatan 15 menit membaca.
- 2) Kegiatan 15 menit membaca dilakukan setiap hari (di awal, tengah, atau menjelang akhir pelajaran).
- 3) Buku yang dibacakan atau dibaca oleh peserta didik dicatat judul dan nama pengarangnya dalam catatan harian.

¹⁸ Dewi Utama Faizah, dkk., *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

- 4) Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lain terlibat dalam kegiatan 15 menit dengan membacakan buku atau ikut membaca dalam hati.
- 5) Ada perpustakaan sekolah atau ruang khusus untuk menyimpan buku non-pelajaran.
- 6) Ada sudut baca kelas di tiap kelas dengan koleksi buku non-pelajaran.
- 7) Ada poster-poster kampanye membaca di kelas, koridor, dan area sekolah lainnya.
- 8) Ada bahan kaya teks di tiap kelas.
- 9) Kebun sekolah, kantin, dan UKS menjadi lingkungan yang kaya literasi. Terdapat poster-poster tentang pembiasaan hidup sehat, kebersihan, dan keindahan di kebun sekolah, kantin, dan UKS. Makanan di kantin sekolah diolah dengan bersih dan sehat.
- 10) Sekolah berupaya untuk melibatkan publik (orang tua, alumni, dan elemen masyarakat lain) untuk mengembangkan kegiatan literasi sekolah.

3. Tahap pengembangan

Pada tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta meningkatkan kelancaran dan

pemahaman membaca siswa.

Dalam tahapan ini, siswa akan dituntun untuk melakukan pengembangan kecakapannya dalam literasi melalui kegiatan nonakademis. Hal ini bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan menangkap bacaan yang telah dilakukan yang kemudian mengkaitkan dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis dan mengelola potensi komunikasi secara kreatif.

3.1. Pengertian Umum

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari Unsur-unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilahirkan sebagai upaya formulasi kebijakan, serta pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia dimana ada kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan pada aspek-aspek yang berdasar pada Standar Nasional Perpustakaan. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga telah menjadi salah satu unsur Indikator Kinerja Kunci (IKK) di bidang perpustakaan dengan bobot urusan sebesar 2% dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian seluruh pemerintah daerah memiliki kewajiban

dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mencakup semua urusan yang menjadi kewenangannya, khususnya di bidang perpustakaan, guna mengukur capaian kinerja pemerintahan daerah di wilayahnya.

Dari hasil kajian IPLM dapat mengetahui aspek-aspek mana saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan serta aspek yang harus diperkuat dan dibangun agar kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan lebih efektif baik di level nasional maupun daerah. Pencapaian skor IPLM hendaknya tidak dijadikan sebagai komparasi atau capaian prestasi, melainkan harus dilihat dalam perspektif pemetaan (mapping) untuk melakukan pembinaan berdasarkan sektor atau komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat mana saja yang harus dikembangkan atau ditingkatkan.

Dengan demikian, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah menjadi suatu metode pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di wilayahnya sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

3.2. Rumus Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada dasarnya terdiri atas dua (2) komponen, antara lain: komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). Berikut adalah rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:

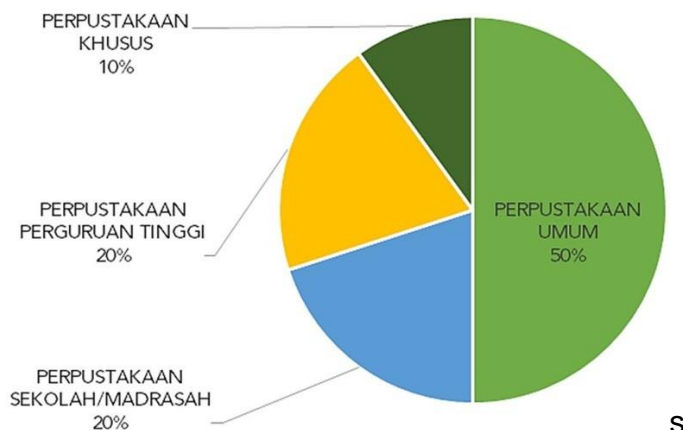
$$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$$

Keterangan:

UPLM_i : variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat.

AM : jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus /jenis perpustakaan.

Rumus ini merupakan kumpulan dari rumus pengukuran rasio dari tujuh (7) komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat beserta pembagiannya dari komponen Aspek Masyarakat. Rumus yang telah dikembangkan ini juga memiliki komponen pendukung baru di antaranya adalah Angka Pembagi Rasio Kota dan Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan Wilayah. Kedua komponen baru ini berfungsi sebagai komponen pendukung dalam rangka netralisasi terhadap anomali angka yang muncul karena faktor ketimpangan angka yang disebabkan tinggi rendahnya jumlah populasi di suatu wilayah. Kedua komponen ini akan dibahas pada sub bab di bawah. Selain itu pada setiap pengukuran UPLM terdapat pembobotan pada tiap jenis perpustakaan dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 3.1 Pembobotan Per Jenis Perpustakaan

Adapun pembobotan per jenis perpustakaan ini diterapkan berdasarkan besarnya cakupan pemustaka yang dilayani oleh tiap perpustakaan tersebut. Perpustakaan umum memiliki porsi bobot terbesar (50%) karena memiliki cakupan layanan pemustaka yang lebih luas dan beragam. Berbeda dengan jenis perpustakaan lainnya, yakni perpustakaan sekolah/madrasah (20%), perpustakaan perguruan tinggi (20%), dan perpustakaan khusus (10% yang memiliki segmentasi pemustaka yang lebih spesifik dan terbatas pada lingkup instansi yang membawahinya.

Dengan demikian pada setiap penghitungan UPLM1 hingga UPLM7 pada tiap jenis perpustakaan berlaku pembobotan tersebut.

3.3. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM)

Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri atas 7 (tujuh) komponen sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2 Tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM)

Penjelasan 7 (tujuh) komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yaitu:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM);

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum, yakni jumlah ketersediaan unit perpustakaan umum (Kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yang kemudian dibagi dengan jumlah populasi penduduk Kota;
- b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah ketersediaan unit perpustakaan sekolah/madrasah mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK kemudian dibagi dengan jumlah populasi civitas sekolah (jumlah siswa/peserta didik dan guru) di Kota. Catatan: perpustakaan sekolah/madrasah dihitung bukan berdasarkan aspek kewenangan pembinaan, melainkan berdasarkan keberadaannya di suatu wilayah sesuai dengan fungsi sebagai perpustakaan pembina;
- c. Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah perpustakaan perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi) dibagi dengan jumlah populasi civitas akademika (jumlah mahasiswa dan dosen) di Kota;
- d. Rasio ketersediaan perpustakaan khusus, yakni jumlah perpustakaan khusus (instansi pemerintah pusat/daerah dan instansi swasta) yang dibagi dengan jumlah populasi bekerja di wilayah Kota.

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM1:

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaan (kecuali Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai berikut:

1) Perpustakaan Umum

$$\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PROVINSI}}{\text{JUMLAH POPULASI PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KECAMATAN}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}}$$

Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan dibagi dengan Jumlah Populasi Kota karena masih bagian dari pengukuran wilayah Kota serta menjadi bagian pembinaan dari Perpustakaan Kota (hal ini juga berlaku ke komponen UPLM lainnya, kecuali UPLM5).

2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah

$$\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SD/MI}}{\text{JUMLAH CIVITAS SD/MI}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMP/MTs}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMP/MTs}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMA/MA/SMK}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMA/MA/SMK}}$$

Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus tidak dirinci karena sub jenis kedua jenis perpustakaan tersebut bersifat setara atau antara satu dengan lainnya tidak ada tingkatan ordinal (hal ini juga berlaku ke komponen UPLM lainnya, kecuali UPLM5).

2. Tingkat Ketercukupan koleksi (UPLM2)

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini (satuan judul) terdiri atas:

- a. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan umum (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan umum dibagi dengan jumlah populasi penduduk Kota;
- b. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi

perpustakaan sekolah dibagi dengan jumlah civitas sekolah di Kota. Catatan : koleksi yang dihitung/diukur adalah koleksi buku teks pengayaan (di luar kurikulum sekolah), bukan buku paket pelajaran;

- c. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan perguruan tinggi (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan perguruan tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademika di Kota;
- d. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan khusus (baik tercetak maupun digital), yakni jumlah koleksi perpustakaan khusus dibagi dengan jumlah civitas akademika di Kota.

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM2:

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaan (kecuali Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai berikut:

1) Perpustakaan Umum

$$\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN PROVINSI}}{\text{JUMLAH POPULASI PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN KECAMATAN}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}}$$

2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah

$$\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN SD/MI}}{\text{JUMLAH CIVITAS SD/MI}} + \frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN SMP/MTs}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMP/MTs}} + \frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN SMA/MA/SMK}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMA/MA/SMK}}$$

3. Tingkat Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3);

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- a. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum, yakni jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah populasi penduduk kota;

- b. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah civitas sekolah di Kota;
- c. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah tenaga perpustakaan perguruan tinggi (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah civitas akademika di Kota;
- d. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan khusus, yakni jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dibagi dengan jumlah populasi bekerja di Kota;

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM3:

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN UMUMI}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaan (kecuali Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai berikut:

1) Perpustakaan Umum

$$\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN PROVINSI}}{\text{JUMLAH POPULASI PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN KECAMATAN}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}}$$

2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah

$$\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN SD/MI}}{\text{JUMLAH CIVITAS SD/MI}} + \frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN SMP/MTs}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMP/MTs}} + \frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN SMA/MA/SMK}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMA/MA/SMK}}$$

4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM4);

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- a. Rasio tingkat kunjungan pemustaka dan pengunjung

per hari di perpustakaan umum (secara onsite maupun online), yakni jumlah kunjungan pemustaka dan pengunjung per hari dibagi dengan jumlah populasi penduduk di kota;

- b. Rasio tingkat kunjungan civitas sekolah per hari di perpustakaan sekolah/madrasah (secara onsite maupun online), yakni jumlah kunjungan civitas sekolah per hari dibagi dengan jumlah civitas sekolah di Kota;
- c. Rasio tingkat kunjungan civitas akademika per hari di perpustakaan perguruan tinggi (secara onsite maupun online), yakni jumlah kunjungan civitas akademika per hari dibagi dengan jumlah civitas akademika di Kota;
- d. Rasio tingkat kunjungan karyawan/pegawai per hari di perpustakaan khusus (secara onsite dan online), yakni jumlah kunjungan karyawan/pegawai per hari dibagi dengan jumlah populasi bekerja di Kota;

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM4:

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaan (kecuali Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai berikut:

1) Perpustakaan Umum

$$\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PROVINSI}}{\text{JUMLAH POPULASI PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KECAMATAN}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}}$$

2) Perpustakaan Sekolah

$$\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SD/MI}}{\text{JUMLAH CIVITAS SD/MI}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SMP/MTs}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMP/MTs}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SMA/MA/SMK}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMA/MA/SMK}}$$

5. Rasio perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan (UPLM5);

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- a. Rasio jumlah perpustakaan umum yang dibina berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP), yakni jumlah perpustakaan umum yang sudah dibina sesuai dengan SNP, sudah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)
- b. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan umum yang ada di wilayah Kota;
- c. Rasio jumlah perpustakaan sekolah/madrasah berbasis SNP dan/atau memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan sekolah/madrasah yang sudah dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan sekolah/madrasah yang ada di wilayah Kota;
- d. Rasio jumlah perpustakaan perguruan tinggi berbasis SNP dan/atau memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan tinggi yang ada di wilayah Kota;
- e. Rasio jumlah perpustakaan khusus berbasis SNP dan/atau memiliki NPP, yakni jumlah perpustakaan khusus umum

yang dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, yang dibagi dengan jumlah total perpustakaan khusus yang ada di wilayah Kota;

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM5:

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaan (kecuali Perpustakaan Perguruan tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai berikut:

1) Perpustakaan Umum

$$\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PROVINSI YANG SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KAB/KOTA YANG SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KECAMATAN YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KECAMATAN}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN DESA/KEL YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}$$

2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah

$$\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SD/MI YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SD/MI}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMP/MTs YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMP/MTs}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMA/MA/SMK YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMA/MA/SMK}}$$

6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM6); Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- a. Rasio jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di Kota;
- b. Rasio jumlah partisipasi civitas sekolah dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah

civitas sekolah yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di Kota;

- c. Rasio jumlah partisipasi civitas akademika dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah partisipasi civitas akademika yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di Kota;
- d. Rasio jumlah partisipasi karyawan/pegawai dalam sosialisasi perpustakaan (secara onsite maupun online), yakni jumlah partisipasi karyawan/pegawai yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dibagi dengan jumlah populasi penduduk di Kota;

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM6:

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KARYAWAN YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaan (kecuali Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai berikut:

1) Perpustakaan Umum

$$\frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN PROVINSI}}{\text{JUMLAH POPULASI PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN KECAMATAN}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}}$$

2) Perpustakaan Sekolah

$$\frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SD/MI}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SMP/MTs}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SMA/MA/SMK}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}}$$

Rasio anggota perpustakaan (UPLM7)

Rumus yang digunakan untuk mengukur komponen ini terdiri atas:

- e. Rasio jumlah anggota perpustakaan umum (Kota,

kecamatan, desa/kelurahan), yakni jumlah anggota perpustakaan umum dibagi dengan jumlah populasi penduduk Kota;

- f. Rasio jumlah anggota perpustakaan sekolah/madrasah, yakni jumlah anggota perpustakaan sekolah/madrasah dibagi dengan jumlah civitas sekolah yang ada di Kota;
- g. Rasio jumlah anggota perpustakaan perguruan tinggi, yakni jumlah anggota perpustakaan perguruan tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademika yang ada di Kota;
- h. Rasio jumlah anggota perpustakaan khusus, yakni jumlah anggota perpustakaan khusus dibagi dengan jumlah populasi penduduk bekerja yang ada di Kota;

Berikut adalah rumus pengukuran komponen UPLM7:

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

Rumus tersebut kemudian dirinci berdasarkan jenis perpustakaan (kecuali Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus), menjadi sebagai berikut:

1) Perpustakaan Umum

$$\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}}$$

2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah

$$\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SD/MI}}{\text{JUMLAH CIVITAS SD/MI}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SMP/MTs}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMP/MTs}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SMA/MA/SMK}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMA/MA/SMK}}$$

3.4. Aspek Masyarakat

Aspek Masyarakat Berdasarkan Jenis Perpustakaan

Perpustakaan Umum	Perpustakaan Sekolah/Madrasah	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Perpustakaan Khusus
Jumlah Populasi Penduduk: 1. Provinsi 2. Kabupaten/kota	Jumlah Civitas Sekolah: 1. Peserta didik/siswa 2. Guru	Jumlah Civitas Akademika: 1. Mahasiswa 2. Tenaga edukatif/dosen	Jumlah Populasi Bekerja
Sumber: Laporan Statistik Tahunan BPS: 1. Provinsi 2. Kabupaten/kota	Sumber: 1. Laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kemendikbud 2. Laman EMIS Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Sumber: Laporan Statistik Tahunan BPS: 1. Provinsi 2. Kabupaten/kota	Sumber: Laporan Statistik Tahunan BPS

Gambar 3.3 Aspek Masyarakat Berdasarkan Jenis Perpustakaan

Berbeda dengan konsep pada pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada versi sebelumnya, komponen Aspek Masyarakat (AM) disesuaikan berdasarkan lokus atau segmentasi jenis perpustakaan. Berikut adalah sumber data resmi yang digunakan sebagai komponen Aspek Masyarakat dalam penerapan rumus Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:

7. Populasi Penduduk

Data yang digunakan pada populasi penduduk adalah dengan mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

8. Populasi Civitas Sekolah

Data yang digunakan pada populasi civitas sekolah adalah data populasi jumlah siswa dan guru. Data jumlah siswa dan guru yang digunakan di sini adalah data siswa dan guru pada SD, SMP, SMA dan SMK. Sumber data resmi yang digunakan pada komponen ini adalah laman web resmi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan EMIS Pendidikan Islam dari

Kementerian Agama.

9. Populasi Civitas Akademika

Data yang digunakan pada civitas akademika adalah data populasi jumlah mahasiswa dan dosen (tenaga pendidik).

10. Populasi Penduduk Bekerja

Data yang digunakan pada populasi penduduk usia kerja dapat menggunakan sumber publikasi data resmi tahunan dari BPS. Data yang diambil adalah data penduduk yang berstatus Bekerja (Working).

3.5. Angka Pembagi Rasio Kota

Komponen Angka Pembagi Rasio Kota ditujukan untuk membuat skala bagi angka pembagi populasi pada saat pengukuran rasio UPLM Kota yang dibagi dengan jumlah populasi penduduk. Hal ini dilakukan karena adanya anomali angka yang disebabkan faktor tinggi dan rendahnya jumlah populasi di suatu wilayah. Meski demikian hal ini menjadikan ketimpangan angka di mana angka rasio di wilayah yang memiliki populasi rendah lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang memiliki populasi lebih tinggi/padat. Dengan demikian angka rasio Kota yang dihasilkan dari hasil pembagi tersebut tidak menjadi terlalu kecil agar memudahkan dalam penerapan rumus IPLM. Angka Pembagi Rasio Kota diadopsi dari jumlah minimal pemustaka berdasarkan jumlah populasi penduduk pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan Kota.

3.6. Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan

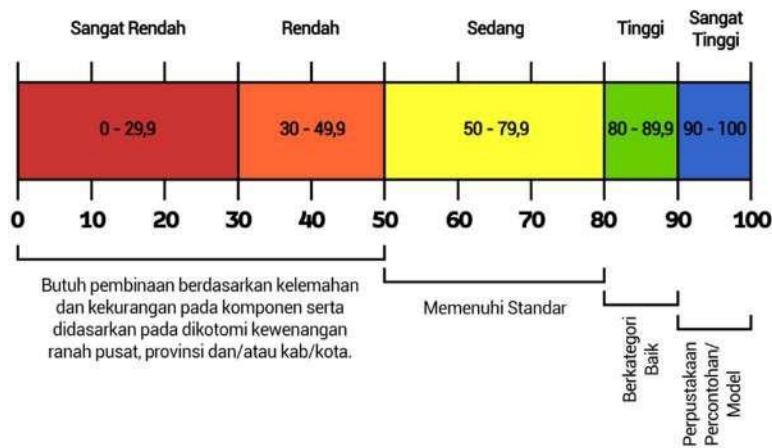
Fungsi dari Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan memiliki kesamaan dengan Angka Pembagi Rasio Kota. Hanya saja Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan ini diterapkan

pada angka yang dihasilkan setelah rasio UPLM dihitung kemudian dikalikan dengan angka koreksi yang ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan wilayahnya.

Dengan demikian wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan memiliki angka rasio yang lebih logis dan tidak terlampau kecil akibat angka pembagi populasi yang besar.

3.7. Tingkat skor IPLM

Berbeda dengan konsep pengukuran dalam kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebelumnya, pada pengukuran ini skor indeks menggunakan skala level 100:



Gambar 3.4 Tingkatan Skor IPLM

3.8. Review Rumus IPLM

$$\frac{UPLM_1}{AM} = 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

PERPUSTAKAAN UMUM

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PROVINSI}}{\text{ANGKA PEMBAGI RATIO PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}}{\text{ANGKA PEMBAGI RATIO KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KECAMATAN}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} \right]$$

PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

$$20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SD/MI}}{\text{JUMLAH CIVITAS SD/MI}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMP/MTs}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMP/MTs}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SMA/MA}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMA/MA}} \right]$$

PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

$$20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN INSTITUT}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA INSTITUT}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN POLITEKNIK}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN AKADEMI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA AKADEMI}} \right]$$

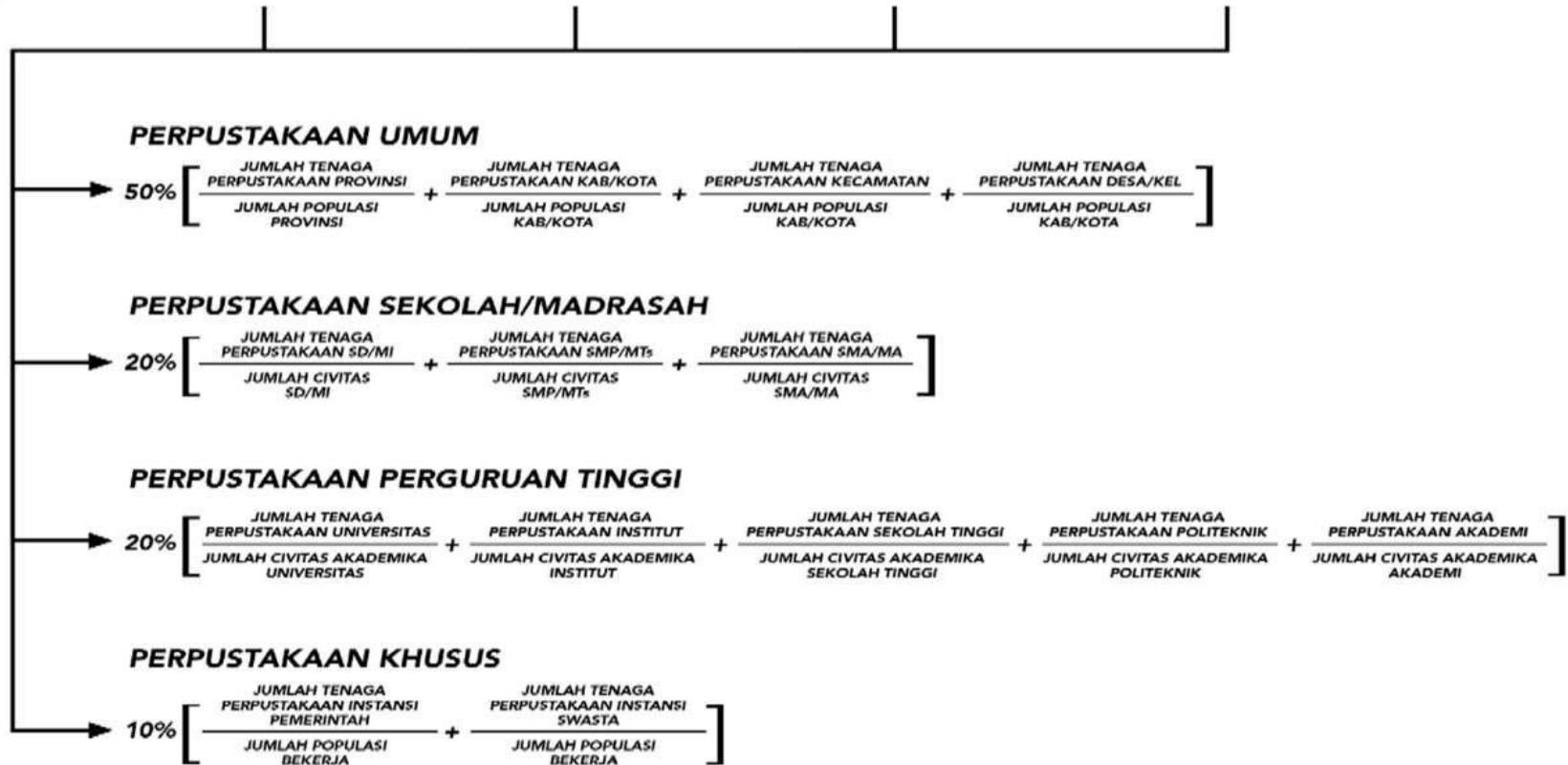
PERPUSTAKAAN KHUSUS

$$10\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN INSTANSI PEMERINTAH}}{\text{JUMLAH POPULASI BEKERJA}} + \frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN INSTANSI SWASTA}}{\text{JUMLAH POPULASI BEKERJA}} \right]$$

$$\frac{UPLM_2}{AM} = 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$



$$\frac{UPLM_3}{AM} = 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH TENAGA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$



UPLM₄ AM

$$= 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

PERPUSTAKAAN UMUM

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN PROVINSI}}{\text{JUMLAH POPULASI PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KECAMATAN}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} \right]$$

PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

$$20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SD/MI}}{\text{JUMLAH CIVITAS SD/MI}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SMP/MTs}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMP/MTs}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SMA/MA}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMA/MA}} \right]$$

PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

$$20\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN INSTITUT}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA INSTITUT}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN POLITEKNIK}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN AKADEMI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA AKADEMI}} \right]$$

PERPUSTAKAAN KHUSUS

$$10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN INSTANSI PEMERINTAH}}{\text{JUMLAH POPULASI BEKERJA}} + \frac{\text{JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN INSTANSI SWASTA}}{\text{JUMLAH POPULASI BEKERJA}} \right]$$

UPLM₅ AM

$$= 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN UMUM}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS YANG DIBINA SESUAI STANDAR}}{\text{JUMLAH UNIT PERPUSTAKAAN KHUSUS}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$



$\frac{UPLM_6}{AM}$

$$= 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH KARYAWAN YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

PERPUSTAKAAN UMUM

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN PROVINSI}}{\text{JUMLAH POPULASI PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN KECAMATAN}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} \right]$$

PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

$$20\% \left[\frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SD/MI}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SMP/MTs}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SMA/MA}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} \right]$$

PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

$$20\% \left[\frac{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN INSTITUT}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN POLITEKNIK}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN AKADEMI}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} \right]$$

PERPUSTAKAAN KHUSUS

$$10\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEGAWAI YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN INSTANSI PEMERINTAH}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH KARYAWAN YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN INSTANSI SWASTA}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} \right]$$

$$\frac{UPLM_7}{AM} = 50\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SEKOLAH}}{\text{JUMLAH CIVITAS SEKOLAH}} \right] + 20\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN PERG. TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA}} \right] + 10\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN KHUSUS}}{\text{JUMLAH POPULASI PENDUDUK BEKERJA}} \right] \times \text{ANGKA KOREKSI BERDASARKAN TINGKAT KEPADATAN}$$

PERPUSTAKAAN UMUM

$$50\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN PROVINSI}}{\text{JUMLAH POPULASI PROVINSI}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN KAB/KOTA}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN KECAMATAN}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN DESA/KEL}}{\text{JUMLAH POPULASI KAB/KOTA}} \right]$$

PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

$$20\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SD/MI}}{\text{JUMLAH CIVITAS SD/MI}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SMP/MTs}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMP/MTs}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SMA/MA}}{\text{JUMLAH CIVITAS SMA/MA}} \right]$$

PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

$$20\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN INSTITUT}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA INSTITUT}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN POLITEKNIK}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN AKADEMI}}{\text{JUMLAH CIVITAS AKADEMIKA AKADEMI}} \right]$$

PERPUSTAKAAN KHUSUS

$$10\% \left[\frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN INSTANSI PEMERINTAH}}{\text{JUMLAH POPULASI BEKERJA}} + \frac{\text{JUMLAH PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN INSTANSI SWASTA}}{\text{JUMLAH POPULASI BEKERJA}} \right]$$

4.1 Data Dasar Penghitungan IPLM

Data dasar dalam perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) salah satunya adalah Populasi Penduduk Kota Semarang yaitu sebanyak 1.688.133 jiwa, dengan luas wilayah 373,78 km², tingkat kepadatan 4.534 Jiwa/Km², dan Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan ada 1,5. Populasi siswa dari jenjang SD/MI sampai dengan SMA/MA/SMK sejumlah 197.442 orang. Pspulasi guru dari SD/MI sampai dengan SMA/MA/SMK sebanyak 17.754 Orang. Populasi mahasiswa sebanyak 231.636 orang, dan populasi dosen sebanyak 7.565 orang. Sementara itu Populasi Bekerja sebanyak 907.937 orang. Selengkapnya data dasar yang digunakan dalam perhitungan IPLM Kota Semarang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Dasar Penghitungan IPLM Kota Semarang

No	Uraian	Jumlah
1	Populasi Penduduk Kota (Jiwa)	1.688.133
2	Luas Wilayah (Km ²)	373,78
3	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)	4.516
4	Angka Koreksi Berdasarkan Tingkat Kepadatan	1,5
5	Populasi Siswa	
	SD	110.830
	MI	19.730
	SMP	42660
	MTs	9.499
	SMA/K	43.952
	MA	6.680

No	Uraian	Jumlah
6	Populasi Guru	
	SD	7.102
	MI	1.137
	SMP	3.757
	MTs	798
	SMA/K	4.298
	MA	662
7	Populasi Mahasiswa	231.636
8	Populasi Dosen	7.565
9	Populasi Bekerja	907.937

4.2 Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM-1)

Menurut Kamus Bahasa Utama Di Indonesia, perpustakaan berarti buku, buku atau primbon (Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008 : 1121). Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah library. Istilah perpustakaan berasal dari kata perpustakaan librer atau libri yang artinya buku. Berdasarkan kata Latin, disebut dengan istilah librarus yang berarti tentang buku (Wiji Suwarno, 2010:31) ¹.

Beberapa definisi perpustakaan diuraikan secara jelas oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Sutarno NS (2006:11)² perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian suatu bangunan/struktur atau bangunan itu sendiri yang memuat buku-buku Koleksi disajikan dan diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan penelitian dan digunakan jika pembaca membutuhkannya sewaktu-waktu.
2. Menurut Lasa HS (2005: 48)³ perpustakaan adalah suatu sistem informasi yang didalamnya mencakup pengumpulan, penanganan, penyimpanan, menyimpan, menyajikan dan menyebarkan informasi. Informasi ini

¹ Wiji Suwarno. 2010. Pengetahuan Dasar Kepustakaan. Ghalia Indonesia

² Sutarno NS. 2006. Perpustakaan dan Masyarakat Edisi Revisi. Jakarta : CV. Sagung Seto

³Lasa HS. (2005). Manajemen Perpustakaan. Yogyakarta: Gama Media.

mencakup produk intelektual dan artistik manusia. Saat melakukan aktivitas tersebut pengetahuan yang diperlukan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan informalitas di bidang perpustakaan, dokumen dan informasi.

3. Menurut Sulistya-Basuki (1999: 1)⁴ perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian, atau sub bagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku, biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu serta digunakan untuk anggota perpustakaan. Berdasarkan pengertian di tersebut, perpustakaan diidentikan dengan ruangan, koleksi, penyimpanan, dan pemanfaatan.
4. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (1990: 112) perpustakaan adalah kumpulan buku yang disimpan di suatu tempat milik tempat tertentu beberapa agensi. Berdasarkan pengertian tersebut, perpustakaan bersifat terbatas pada sejumlah bahan pustaka (buku dan nonbuku) tertentu milik suatu organisasi pemerintah atau swasta. Sedangkan perpustakaan di zaman modern kini juga menawarkan video, film, kaset, piringan hitam, dan banyak lagi.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, profesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Ciri dan persyaratan tertentu dijelaskan oleh Sutarno NS (2006: 12)⁵ meliputi:

1. Adanya ruangan/gedung yang diperuntukan khusus untuk perpustakaan.
2. Adanya koleksi bahan pustaka dan sumber informasi lainnya.
3. Adanya petugas yang menyelenggarakan kegiatan dan melayani pemakai.
4. Adanya komunitas masyarakat pemakai.
5. Adanya sarana dan prasarana yang diperlukan.
6. Adanya suatu sistem dan mekanisme tertentu yang merupakan tata cara, prosedur, dan aturan-aturan agar segala sesuatunya berlangsung lancar.

⁴ Sulistyo-Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

⁵ Sutarno NS. 2006. Perpustakaan dan Masyarakat Edisi Revisi. Jakarta : CV. Sagung Seto

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan menjadi tempat untuk melayani informasi melalui koleksi bahan pustaka yang dimilikinya. Keberadaan suatu perpustakaan adalah untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran informasi yang baik. Kesadaran akan arti penting informasi inilah yang lazim disebut dengan literasi informasi.

Layanan Perpustakaan adalah jasa yang diberikan kepada pemustaka sesuai dengan misi perpustakaan. Upaya pemerintah dalam memberikan layanan perpustakaan diwujudkan dalam menyediakan perpustakaan bagi pemustaka. Jumlah perpustakaan akan menunjukkan tingkat pemerataan layanan perpustakaan.

Berdasarkan data sekunder yang dimiliki Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dan hasil survey menunjukkan bahwa jumlah perpustakaan sebanyak 929 perpustakaan, terdiri dari Perpustakaan Umum Kota 1 perpustakaan, Perpustakaan Umum Kecamatan 16 perpustakaan, Perpustakaan Umum Kelurahan 177 perpustakaan, Perpustakaan Umum Komunitas, Taman Bacaan, Rumah Pintar atau sejenisnya 64 perpustakaan, Perpustakaan Khusus 31 perpustakaan, perpustakaan SD/MI sebanyak 504 perpustakaan, Perpustakaan SMP/MTS sebanyak 192 perpustakaan, dan perpustakaan SMA/SMK/MA sebanyak 189 perpustakaan. Jumlah perpustakaan di Kota Semarang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Jumlah Perpustakaan Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	1
Perpustakaan Umum Kecamatan	16
Perpustakaan Umum Kelurahan	177

Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan
Perpustakaan Umum Komunitas, Taman Bacaan, Rumah Pintar atau sejenisnya.	64
PERPUSTAKAAN KHUSUS	43
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	504
SMP/MTS	192
SMA/SMK/MA	189
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	59
JUMLAH TOTAL	1.245

Jumlah perpustakaan tidak menjadi patokan utama dalam menganalisis pemerataan layanan perpustakaan. Parameter utama yang menjadi acuan adalah tingkat ketersediaan perpustakaan terhadap aspek masyarakat yang menjadi lokasi kajian. Aspek masyarakat yang dimaksud adalah jumlah penduduk, jumlah orang yang bekerja, jumlah civitas sekolah dan jumlah civitas akademika. Pemerintah berupaya jumlah perpustakaan sebanding dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatannya. Semakin banyak dan semakin padat jumlah penduduk di suatu daerah seharusnya semakin banyak perpustakaan dalam melayani masyarakat. Tingkat Ketersediaan perpustakaan ditunjukkan dengan rumus jumlah perpustakaan tiap 100.000 masyarakat baik penduduk, penduduk usia sekolah maupun penduduk pada usia pendidikan tinggi.

Ketersediaan perpustakaan di Kota Semarang perlu ditingkatkan, khususnya perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum kelurahan, dan perpustakaan khusus. Rasio ketersediaan Perpustakaan Umum Kota ada 0,0000029 perpustakaan per penduduk, Rasio ketersediaan Perpustakaan Umum Kecamatan 0,000009 perpustakaan per penduduk, Rasio ketersediaan Perpustakaan Umum Kelurahan 0,0000105 perpustakaan per penduduk, Rasio ketersediaan Perpustakaan Khusus 0,000047 perpustakaan per penduduk. Rasio ketersediaan Perpustakaan SD/MI 0,004548; Rasio ketersediaan Perpustakaan SMP/MTS 0,004501 perpustakaan per penduduk, Rasio

ketersediaan Perpustakaan SMA/SMK/MA 0,009346 perpustakaan per penduduk, Rasio ketersediaan Perpustakaan Perguruan Tinggi 0,000247 perpustakaan per penduduk. Secara keseluruhan Skor UPLM1 ada 0,005707.

Tingkat Ketersediaan perpustakaan di Kota Semarang disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Tingkat Ketersediaan Perpustakaan
Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan (Perpustakaan Per Penduduk)
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	0,000029
Perpustakaan Umum Kecamatan	0,000009
Perpustakaan Umum Kelurahan	0,000105
PERPUSTAKAAN KHUSUS	0,000047
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	0,004548
SMP/MTS	0,004501
SMA/SMK/MA	0,009346
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	0,000247
SKOR UPLM1	0,005707

Jumlah perpustakaan dan tingkat ketersediaan perpustakaan pada tahun mendatang perlu dilakukan pendataan kembali agar diperoleh data yang lebih up to date dalam rangka pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

4.3 Tingkat Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM-2)

Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada pemustaka.

Koleksi yang dimaksud dalam kajian IPLM adalah banyaknya judul buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Koleksi perpustakaan memberikan gambaran terkait ketersediaan bacaan yang akan memberikan wawasan yang lebih luas bagi pemustaka. Koleksi perpustakaan dapat terdiri dari berbagai jenis buku seperti ilmu pengetahuan sosial, teknologi, komputer, sastra, agama, sains, geografi dan sejarah, kesenian, serta filsafat dan psikologi.

Jenis-jenis Koleksi Perpustakaan Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari 4 jenis yaitu media cetak, media elektronik atau digital, media film dan media gabungan antara film, digital dan elektronik.

1. Buku. Buku adalah bahan perpustakaan yang merupakan suatu kesatuan utuh dan yang paling utama terdapat dalam koleksi perpustakaan. Berdasarkan standar dari Unesco tebal buku paling sedikit 49 halaman tidak termasuk kulit maupun jaket buku. Diantaranya buku fiksi, buku teks, dan buku rujukan. Lembaran kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Jadi semua lembaran lepas yang berjilid yang berisi tulisan atau kosong termasuk buku, tetapi karena bentuk format isinya ada yang berbeda, maka ada jenis buku yang dikatakan majalah, jurnal, terbitan berkala dan cetak biru atau gambar teknik.
2. Buku ajar atau buku teks. Buku ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, seperti buku-buku yang dijadikan pegangan atau pedoman oleh guru, dosen, pelatih dan penatar, biasanya di dalam buku ajar ditemui banyak kutipankutipan teknik.
3. Buku pegangan. Buku pegangan adalah sebuah buku yang berisi subjek tertentu mengenai suatu ilmu pengetahuan (Pelajaran) yang digunakan untuk memberi petunjuk dalam prakteknya.
4. Buku kamus. Kamus adalah sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya ucapannya, ejaannya, dan sebagainya. Di dalam sebuah kamus yang ideal sepatutnya diberikan juga keterangan tentang pemenggalan kata, informasi tentang asal-usul kata, informasi tentang baku dan tidaknya sebuah kata, informasi tentang kata-kata arkais dan juga klasik, informasi tentang area penggunaan kata, informasi tentang status sebuah kata, dan berbagai informasi lainnya.
5. Buku Ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan kumpulan penjelasan kata-

kata yang berisi informasi secara luas, lengkap dan disusun berdasarkan huruf yang dicetak ke dalam buku. Pada dasarnya ensiklopedia merupakan perkembangan dari kamus. Namun tentunya ensiklopedia berbeda dengan kamus, ensiklopedia merupakan sumber pengetahuan yang bisa ditemukan di dalamnya seluruh bidang ilmu pengetahuan. Walau banyak yang menyamakan kamus dengan ensiklopedia sama artinya namun lebih jauh lagi ensiklopedia lebih memberikan pengertian dari suatu kata dengan lebih jelas dan terperinci dari kamus.

6. Buku almanak. Buku almanak adalah suatu buku yang digunakan sebagai acuan melihat informasi tentang daftar hadir, daftar minggu, daftar bulan, peristiwa dan hari penting dalam setahun atau tahun-tahun tertentu.
7. Buku direktori. Buku direktori adalah sebuah buku yang berisikan acuan atau petunjuk praktis dalam menemukan alamat, nomor telepon, atau keterangan lainnya tentang seseorang atau suatu instansi. Seperti direktori perpustakaan indonesia yang di dalamnya berisikan alamat-alamat perpustakaan, namun kepalanya, jumlah koleksi dan lain sebagainya.
8. Buku biografi. Buku biografi adalah sebuah buku yang berisikan informasi tentang seseorang tokoh atau beberapa orang tokoh yang terkenal dan disusun secara alfabetis, mulai dari nama gelar dan pendidikan, Tanggal lahir, Tanggal kematian, tempat menetap, pekerjaan, hobi, alamat, dan riwayat hidup lainnya.
9. Buku indeks. Buku indeks adalah buku yang memuat informasi mengenai halaman dimana terdapat masingmasing kata atau di dalam karya yang berjilid banyak. Dalam menciptakan sebuah buku haruslah tersusun dengan rapi dan berurutan. Salah satu yang harus ada di sebuah buku ialah Indeks buku. Karena terkadang di dalam buku terdapat istilah-istilah yang telah tersusun berdasarkan abjad, nah ketika akan mencari sebuah istilah maka akan dapat dengan mudah ditemukan dengan melihat indeks buku. Jadi bisa dikatakan fungsi indeks buku yaitu untuk mencari berbagai istilah yang ada di sebuah buku.
10. Buku abstrak. Buku abstrak adalah sebuah buku yang memuat lembaran sari karangan biasanya buku abstrak diterbitkan berdasarkan subjek-subjek tertentu.

11. Jurnal. Jurnal adalah buku yang berisikan tulisan atau karangan ilmiah atau uraian ilmiah tentang suatu subjek atau suatu bidang tertentu, umpamanya jurnal psikologi, jurnal pendidikan dan lain-lain.
12. Majalah. Buku Majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Selain memuat artikel, Majalah juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, review, ilustrasi atau fitur lainnya yang mewarnai isi dari majalah. Oleh karena itu, majalah dijadikan salah satu pusat informasi bacaan yang sering dijadikan bahan rujukan oleh para pembaca dalam mencari sesuatu hal yang diinginkannya.
13. Surat kabar. Surat kabar adalah lembaran-lembaran yang berisikan beritaberita atau kabar-kabar tentang kejadian dari hari kemaren, beberapa hari kemaren, opini seseorang dan lain-lainnya. Surat kabar biasanya diterbitkan tiap hari sekali seminggu dan sekali sebulan, kecuali hari libur Nasional.
14. Terbitan pemerintah pusat/ daerah. Lembaran negara adalah yang diklip pada sisi kiri atas yang berisikan satu atau sekumpulan undang-undang peraturan – peraturan pemerintah. Presiden, menteri, dan jajarannya yang setingkat, bisa berbentuk peraturan daerah, peraturan gubernur atau keputusan Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD).
15. Sled atau slide. Sled adalah koleksi perpustakaan yang terdiri dari film yang dipotong-potong berbentuk lembaran-lembaran. Untuk menyalakan sled dimasukan kedalam alat sled proyektor biasanya isi dari slide adalah rangkaian cerita untuk pendidikan atau untuk pengajaran.

Koleksi perpustakaan akan mempengaruhi pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat/pemustaka. Pemanfaatan bahan pustaka sangat penting dalam kegiatan peningkatan ilmu pengetahuan, karena dengan menggunakan bahan pustaka khususnya melalui buku bacaan dapat menganalisis aspek-aspek keterbacaan pada bahan pustaka. Dengan demikian terlihat bahwa penggunaan bahan pustaka akan menghasilkan perolehan informasi, pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan fakta seperti yang disajikan dalam bahan pustaka.

Koleksi perpustakaan memegang peranan yang sangat penting karena produk utama perpustakaan adalah tersedianya koleksi lengkap yang ada di

perpustakaan. Koleksinya harus disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Koleksi merupakan daya tarik tersendiri dari sebuah perpustakaan. Salah satu aspek penting agar perpustakaan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemustaka adalah tersedianya koleksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, setiap perpustakaan harus membangun koleksi yang kuat untuk kepentingan penggunaannya (Almah, 2012: 25)⁶.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu perpustakaan adalah dokumen atau koleksi yang dimilikinya. Perpustakaan menjadi tidak berarti jika koleksi yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Oleh karena itu, perpustakaan harus memperhatikan kebutuhan pemustaka dalam hal perolehan koleksi.

Koleksi bahan perpustakaan yang lengkap baik jumlah, jenis dan kualitasnya, disusun secara cermat, diolah secara sistematis dan mudah diakses atau dicari informasinya merupakan salah satu kunci keberhasilan perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan perlu memiliki koleksi dokumen yang relatif lengkap, sesuai dengan visi, misi, rencana strategis, kebijakan, dan tujuannya. Koleksi bahan pustaka yang baik dapat memuaskan selera, keinginan dan kebutuhan pembacanya (Sutarno, 2006: 121-122)⁷.

Tentu saja pemanfaatan bahan pustaka sangat erat kaitannya dengan pengembangan koleksi perpustakaan. Karena pengembangan koleksi perpustakaan merupakan suatu proses menjamin kebutuhan informasi pemustaka agar kebutuhannya terpenuhi secara ekonomis dan tepat waktu. Pengembangan koleksi tidak hanya mencakup kegiatan pengumpulan perpustakaan, tetapi juga perumusan kebijakan dalam pemilihan dan penentuan bahan perpustakaan yang akan dilestarikan serta metode yang akan digunakan (Almah, 2012:27)⁸.

Lebih lanjut Hildawati Almah (2012)⁹ berpendapat bahwa ketika melakukan kegiatan pengembangan sumber daya di perpustakaan, pustakawan perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang perpustakaan yang mereka kelola dan komunitas yang mereka layani. Pada dasarnya tujuan

⁶ Almah, Hildawati. 2012. *Pemilihan dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan*. Makassar: Alauddin University Press

⁷ Sutarno NS, (2006). *Manajemen Perpustakaan suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Samitra Media Utama.

⁸ Almah, Hildawati. 2012. *Pemilihan dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan*. Makassar: Alauddin University Press

⁹ ibid

perpustakaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa tujuan atau fungsi utama untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengajaran. Koleksi terorganisir digunakan untuk mendukung program pendidikan dan pengajaran. Fungsi ini sangat penting bagi perpustakaan sekolah dan perpustakaan universitas. Bagi perpustakaan umum, fungsi ini juga tidak kalah pentingnya, mengingat koleksi perpustakaan umum harus menunjang literasi, sebagai sarana penunjang pengembangan pribadi dan pembelajaran sepanjang hayat.
2. Penelitian. Koleksi yang disimpan digunakan untuk mendukung program penelitian. Fungsi ini sangat penting bagi perpustakaan universitas dan perpustakaan khusus.
3. Informasi. perpustakaan harus memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.
4. Sosial. Fungsi ini sangat penting bagi perpustakaan umum, khususnya untuk membantu masyarakat yang ingin memberikan layanan kepada masyarakat baik bermitra dengan lembaga resmi yang ada maupun tidak.
5. Spiritualitas. Fungsi ini penting baik bagi perpustakaan umum maupun jenis perpustakaan lainnya. Perpustakaan hendaknya menyediakan bahan-bahan yang tidak bermanfaat secara langsung tetapi penting untuk menambah pengetahuan, menemukan banyak hal penting dalam hidup (kebenaran, makna hidup, dan lain-lain), memuaskan keingintahuan pikiran, apresiasi yang lebih mendalam terhadap keindahan dan seni. Materi spiritual ini meliputi bahan bacaan seperti karya sastra, buku seni, filsafat, sejarah, biografi, budaya berbagai negara atau masyarakat.
6. Rekreasi. Perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan hiburan penggunaannya dengan menyediakan materi atau kegiatan hiburan. Tujuan ini penting untuk perpustakaan umum dan sekolah.
7. Deposit. Beberapa perpustakaan bertanggung jawab atas pengumpulan atau penerimaan dan penyimpanan semua publikasi dari negara, kota, subjek atau bentuk tertentu. Operasi pemilihan biasanya hampir tidak berperan karena fungsi perpustakaan sebagai arsip adalah mengumpulkan segala sesuatu dalam lingkup yang ditentukan.

Menurut Romi Febriyanto Saputro, salah satu unsur perpustakaan yang ideal yaitu memiliki koleksi yang variatif sesuai keinginan pemustaka. Semakin

bervariasi koleksi sebuah perpustakaan akan semakin menarik hati pemustaka. Menu sajian perpustakaan yang lengkap akan berpeluang besar untuk menghadirkan pemustaka dari berbagai lapisan masyarakat. Perpustakaan hadir untuk mendobrak belenggu yang merantai minat baca masyarakat. Belenggu minat baca masyarakat bersumber pada tiga hal.

1. Belenggu genetika. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak suka membaca cenderung akan melahirkan anak-anak yang juga tidak suka membaca. Inilah yang disebut dengan tingkah laku imitasi. Seorang anak akan meniru kebiasaan orang tua.
2. Belenggu sekolah. Orientasi pendidikan di sekolah yang saat ini mengutamakan kelulusan dalam ujian akhir nasional secara tidak langsung akan mematikan minat baca peserta didik. Demi menggapai kelulusan dalam beberapa mata pelajaran yang di –UN- kan, peserta didik menempuh cara praktis dengan mengikuti bimbingan belajar model “drilling soal”. Model pembelajaran semacam ini memasung kreativitas dan inovasi peserta didik yang hanya bisa didapat dengan proses membaca.
3. Belenggu pergaulan. Pergaulan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk membentuk karakter seseorang. Teman bermain di sekolah maupun di rumah yang tidak suka membaca akan mengakibatkan seseorang juga tidak suka membaca.

Ketiga macam belenggu di atas akan mampu dibuka oleh perpustakaan jika perpustakaan bersikap permisif dan terbuka terhadap segala hobi, kesenangan, dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Perpustakaan ideal ialah perpustakaan yang mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk membangkitkan potensi membaca yang ada di masyarakat. Pendekatan ini disesuaikan dengan kegemaran, hobi, kesenangan, dan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Jumlah koleksi perpustakaan di Kota Semarang sebanyak 1.590.132 judul, terdiri dari koleksi Perpustakaan Umum Kota sebanyak 52.128 judul, Perpustakaan Umum Kecamatan sebanyak 2.416 judul, Perpustakaan Umum Kelurahan sebanyak 13.098 judul, Perpustakaan Khusus sebanyak 2.924 judul, Perpustakaan SD/MI sebanyak 201.600 judul, Perpustakaan SMP/MTS sebanyak 131.904 judul, Perpustakaan SMA/SMK/MA sebanyak 46.683 judul,

dan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebanyak 73.897 judul. Jumlah koleksi perpustakaan di Kota Semarang tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Jumlah Koleksi Perpustakaan
Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Jumlah Koleksi Perpustakaan (Judul)
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	52.128
Perpustakaan Umum Kecamatan	2.416
Perpustakaan Umum Kelurahan	13.098
PERPUSTAKAAN KHUSUS	2.924
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	201.600
SMP/MTS	131.904
SMA/SMK/MA	46.683
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	56.286

Perhitungan ketercukupan koleksi perpustakaan umum daerah mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh IFLA/UNESCO. Berdasarkan IFLA/UNESCO, jumlah koleksi dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang penduduk membaca 2 (dua) koleksi. Dua koleksi yang dimaksud dalam kajian IPLM adalah dua judul buku yang dapat dibaca oleh masyarakat atau pemustaka. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO dihitung dengan rumusan jumlah koleksi dibagi 2 (dua) kali jumlah penduduk.

Rasio Ketersediaan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Umum Kota sebanyak 0,030879 judul per orang, Perpustakaan Umum Kecamatan sebanyak 0,001431 judul per orang, Perpustakaan Umum Kelurahan sebanyak 0,007759 judul per orang, Perpustakaan Khusus sebanyak 0,003220 judul per orang, Perpustakaan SD/MI sebanyak 1,819002 judul per orang, Perpustakaan SMP/MTS sebanyak 3,091983 judul per orang, Perpustakaan SMA/SMK/MA sebanyak 2,308525 judul per orang, dan Perpustakaan

Perguruan Tinggi sebanyak 0,023508 judul per orang. Secara total Skor UPLM Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan ada 2,266981.

Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan di Kota Semarang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan
Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Rasio Ketersediaan Koleksi Perpustakaan (Judul Per Orang)
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	0,030879
Perpustakaan Umum Kecamatan	0,001431
Perpustakaan Umum Kelurahan	0,007759
PERPUSTAKAAN KHUSUS	0,003220
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	1,819002
SMP/MTS	3,091983
SMA/SMK/MA	2,308525
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	0,023508
SKOR UPLM2	2,266981

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan koleksi perpustakaan pada perpustakaan umum kota, perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum kelurahan, perpustakaan khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi belum memenuhi standar yang dikeluarkan oleh IFLA/UNESCO karena masih kurang dari 2 judul per orang. Sementara itu pada perpustakaan sekolah telah memenuhi standar IFLA/UNESCO karena telah mencapai 3 judul per orang. Penambahan koleksi perlu dilakukan, karena tidak hanya mengejar jumlah judul agar memenuhi target, tetapi juga harus mempertimbangkan jenis atau kategori buku yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian ketercukupan koleksi akan dimanfaatkan dengan baik oleh pemustaka.

Koleksi perpustakaan merupakan salah satu unsur yang dapat memanfaatkan perkembangan teknologi di dunia, terutama dalam penyajian koleksi digital. Koleksi digital menjadi salah satu alternatif selain buku cetak sehingga memudahkan pemustaka dalam mendapatkan koleksi yang dibutuhkan. Dengan demikian, informasi berupa jenis dan judul koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan dapat terakses dengan mudah. Teknologi yang terus berkembang disertai dinamika kehidupan manusia membuat teknologi informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Di Kota Semarang, koleksi digital baru dimiliki oleh perpustakaan sekolah SMA ada 1.350 *e-book*, SMK ada 1.750 *e-book*, MA ada 870 *e-book*. Kedepan koleksi digital perlu ditingkatkan kepemilikannya pada perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum kelurahan, perpustakaan khusus, perpustakaan SD/MI, perpustakaan SMP/MTs dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Dalam rangka pengembangan perpustakaan kedepan, perlu upaya peningkatan koleksi perpustakaan yang mengarah pada pemenuhan koleksi sesuai standar nasional perpustakaan yang disesuaikan dengan masing-masing jenis perpustakaan. Jenis koleksi perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan yaitu berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi. Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal. Koleksi nonfiksi perpustakaan sekolah/madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala. Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu. Selain koleksi tersebut, perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Jumlah koleksi sesuai standar nasional perpustakaan pada setiap perpustakaan umum atau perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul. Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Jumlah koleksi, harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Sesuai standar nasional perpustakaan pengembangan koleksi harus

dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan. Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Sesuai standar nasional perpustakaan pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku. Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sesuai standar nasional perpustakaan perawatan koleksi harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala. Perawatan koleksi meliputi penyimpanan dan konservasi. Sementara itu dalam hal pelestarian koleksi perpustakaan kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

4.4 Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM-3)

Tenaga perpustakaan yang dimaksud adalah jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Tenaga pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tenaga teknis perpustakaan dapat juga dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Tenaga perpustakaan memegang peran penting dalam menjalankan operasi perpustakaan dan mendukung misi perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan sumber daya pendidikan. Salah satu peran utama tenaga perpustakaan adalah melayani pengguna. Mereka membantu pengunjung dalam mencari sumber daya, memberikan rekomendasi bacaan, memberikan bantuan dalam penelitian, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pengguna.

Tenaga perpustakaan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengguna dalam menggunakan sumber daya perpustakaan, termasuk penelusuran katalog, penggunaan basis data, dan literasi informasi. Pustakawan seringkali memiliki pengetahuan yang mendalam tentang literatur dan sumber daya yang tersedia di perpustakaan. Mereka dapat memberikan konsultasi kepada peneliti dan mahasiswa dalam mengembangkan proyek penelitian mereka. Beberapa perpustakaan mengadakan program dan acara

seperti lokakarya, pertemuan kelompok diskusi, dan presentasi. Tenaga perpustakaan berperan dalam merencanakan, mengorganisir, dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini.

Di era digital, tenaga perpustakaan juga berperan dalam mengelola sistem perpustakaan berbasis teknologi, termasuk basis data dan katalog online. Mereka memastikan bahwa pengguna dapat mengakses sumber daya secara efisien melalui platform digital. Mereka memastikan bahwa akses terhadap sumber daya ini aman dan efisien. Perkembangan teknologi terus berubah, dan tenaga perpustakaan harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Mereka berperan dalam mengintegrasikan teknologi baru ke dalam layanan perpustakaan. Dalam perpustakaan modern, tenaga perpustakaan juga mengelola dan merawat koleksi digital, termasuk arsip digital, e-book, jurnal online, dan database.

Minimnya jumlah tenaga perpustakaan menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan perpustakaan. Cukup banyak perpustakaan yang belum memiliki tenaga perpustakaan dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu kedepan perlu diupayakan agar ada penambahan jumlah tenaga perpustakaan baik pada perpustakaan umum Kota, Perpustakaan Umum Kelurahan, Perpustakaan Khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi.

Selain peningkatan kuantitas, perlu pula dilakukan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan agar tercipta pustakawan dan tenaga perpustakaan yang mampu berperan sebagai agen informasi, ilmuwan, dan pendidik, sehingga mampu memberdayakan informasi bukan sekadar melayankan informasi.

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan dalam hal ini mencakup tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja (Perpustakaan Nasional RI, 2012). Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengelola perpustakaan adalah kompetensi dalam bidang pengelolaan perpustakaan, kompetensi dalam bidang teknologi informasi, kompetensi dalam melakukan komunikasi, kompetensi kepribadian (soft skill) dan kompetensi Ilmu-ilmu lain yang mendukung.

1. Kompetensi dalam bidang pengelolaan perpustakaan. Seorang pengelola

perpustakaan harus menguasai ilmu tentang perpustakaan. Skill dasar pengelolaan perpustakaan yang harus dimiliki adalah bagaimana mendapatkan suatu informasi, mengolah informasi, mengelola informasi sampai pada penyebaran informasi. Secara teknis seorang pengelola perpustakaan harus menguasai analisis bahan pustaka, manajemen koleksi, administrasi perpustakaan, layanan teknis perpustakaan, shelving dan lain sebagainya. Kompetensi tersebut bisa diperoleh dari pendidikan secara formal maupun non-formal.

2. Kompetensi dalam bidang teknologi informasi. Kompetensi dalam bidang teknologi informasi yang dimaksudkan adalah kemampuan menggunakan dan menerapkan teknologi informasi yang berkembang saat ini ke dalam pengelolaan perpustakaan. Kompetensi tersebut meliputi kemampuan dalam mengoperasikan komputer, manajemen komputer, manajemen jaringan komputer, maintenance komputer dan jaringan, pengelolaan database dan lain-lain.
3. Kompetensi dalam melakukan komunikasi. Komunikasi sangat penting karena tugas utama perpustakaan adalah pelayanan terhadap pemustaka. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal (dengan kata-kata) ataupun non-verbal (bahasa tubuh). Selain itu, komunikasi dapat dilakukan secara tertulis melalui media-media yang dapat dijangkau oleh pemustaka. Kemampuan bahasa juga menjadi nilai tambah karena pada saatnya, pemustaka tidak hanya berasal dari satu daerah atau satu negara saja. Kemampuan penggunaan bahasa asing (terutama bahasa Inggris) akan memudahkan pengelola perpustakaan untuk berkomunikasi dengan pemustaka yang berasal dari negara lain.
4. Kompetensi kepribadian (soft skill) Soft skill berkaitan dengan tabiat atau perilaku seseorang yang mencerminkan kepribadian. Kepribadian yang baik akan berefek pada profesionalisme dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Perilaku yang dapat meningkatkan kepribadian seseorang antara lain arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan, emosi yang stabil, konsisten dalam tugas, berpikiran terbuka, berwawasan luas, menerima perubahan kearah yang lebih baik, religius, mampu bekerja sama dalam tim dan lain sebagainya.
5. Kompetensi ilmu-ilmu lain yang mendukung tugas kepastakawanan.

Beberapa di antaranya adalah ilmu agama, hukum, ekonomi, psikologi, teknik dan lain sebagainya.

Jumlah Tenaga Perpustakaan (Pustakawan dan Tenaga Teknis) pada Perpustakaan Umum Kota sebanyak 33 orang, Perpustakaan Umum Kecamatan sebanyak 48 orang, Perpustakaan Umum Kelurahan sebanyak 531 orang, Perpustakaan Khusus sebanyak 68 orang, Perpustakaan SD/MI sebanyak 1.008 orang, Perpustakaan SMP/MTS sebanyak 384 orang, Perpustakaan SMA/SMK/MA sebanyak 410 orang, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebanyak 256 orang.

Jumlah tenaga perpustakaan (Pustakawan dan Tenaga Teknis) di Kota Semarang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Jumlah Tenaga Perpustakaan Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan (Pustakawan Dan Tenaga Teknis)
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	33
Perpustakaan Umum Kecamatan	48
Perpustakaan Umum Kelurahan	531
PERPUSTAKAAN KHUSUS	68
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	1.008
SMP/MTS	384
SMA/SMK/MA	410
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	256

Acuan yang menjadi indikator ketercukupan tenaga perpustakaan adalah standar yang dikeluarkan oleh IFLA/UNESCO. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dihitung berdasarkan standar IFLA/UNESCO. Menurut standar IFLA rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum adalah 1:2.500,

artinya 1 orang tenaga perpustakaan dapat melayani 2.500 orang penduduk. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan pada Perpustakaan Umum Kota ada 0,000020 orang per penduduk, Perpustakaan Umum Kecamatan ada 0,000028 orang, Perpustakaan Umum Kelurahan ada 0,000315 orang, Perpustakaan Khusus ada 0,000075 orang per penduduk, Perpustakaan SD/MI ada 0,009095 orang per penduduk, Perpustakaan SMP/MTS ada 0,009001 orang per penduduk, Perpustakaan SMA/SMK/MA ada 0,006389 orang per penduduk, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi ada 0,020275 orang per penduduk. Secara total Skor UPLM-3 ketercukupan Tenaga Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 ada 0,012116.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa perpustakaan yang ketercukupan tenaga perpustakaannya kurang adalah perpustakaan umum Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan, Perpustakaan Umum Kelurahan, Perpustakaan Khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi.

Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (Orang)
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	0,000020
Perpustakaan Umum Kecamatan	0,000028
Perpustakaan Umum Kelurahan	0,000315
PERPUSTAKAAN KHUSUS	0,000075
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	0,009095
SMP/MTS	0,009001
SMA/SMK/MA	0,020275
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	0,001070
SKOR UPLM3	0,012116

Pengembangan kedepan, perlu dilakukan peningkatan upaya yang mengarah pada pemenuhan standar tenaga perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014, Standar Tenaga Perpustakaan mencakup kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Selain tenaga perpustakaan, perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga akreditasi. Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi, dan akan menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier pustakawan.

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya. Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tenaga nonpustakawan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.

Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang perpustakaan. Kapabilitas

merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan. Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan dan pengalaman bekerja di perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun. Integritas merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan. Kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan. Dalam hal tidak terdapat pustakawan, kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.

4.5 Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari (UPLM-4)

Minat masyarakat untuk berkunjung di Perpustakaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Dahlan (2006)¹⁰ beberapa hal yang mendorong orang (pemukim) berkunjung ke perpustakaan adalah:

1. Rasa nyaman;
2. Keadaan lingkungan fisik yang memadai;
3. Keadaan lingkungan sosial yang kondusif;
4. Layanan terakses secara online.

Menurut Sutarno (2006)¹¹ terdapat beberapa hal yang mempengaruhi minat kunjung, yaitu :

1. Rasa ingin tahu yang tinggi Seseorang yang berminat terhadap sesuatu karena tertarik dan ingin tahu.

Keinginan pada dasarnya sudah ada pada setiap orang sejak kecil dan terus berkembang. Seseorang akan tertarik tentang sesuatu apabila sesuatu itu berguna dan menyenangkan sehingga termotivasi untuk

¹⁰ Dahlan, Wiryana. Kemasan Perpustakaan yang Menjual. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

¹¹ Sutarno NS, (2006). Manajemen Perpustakaan suatu pendekatan praktik. Jakarta: Samitra Media Utama.

mengetahui lebih dalam dengan serius. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan inovasi untuk menciptakan perpustakaan yang menarik.

2. Keadaan lingkungan yang memadai Lingkungan yang baik memiliki andil dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Lingkungan tersebut mencakup lokasi yang strategis, mudah dikenal dan dijangkau masyarakat, bebas banjir, bersih, tenang, dan terdapat akses kendaraan. Pemeliharaan gedung merupakan bagian yang penting dan perlu mendapat perhatian. Gedung yang terpelihara dengan baik dan tampak rapi dan bersih menyebabkan pengunjung betah berada di perpustakaan. Untuk membuat lingkungan tampak indah dan asri juga perlu memperhatikan lingkungan penunjang di sekitar perpustakaan seperti pemeliharaan taman. Manfaat penataan ruang perpustakaan dapat mempermudah siswa, guru dan pengunjung lainnya dalam memperoleh bahan pustaka yang diinginkan.

3. Tersedianya kebutuhan yang diinginkan Koleksi perpustakaan yang diminati oleh seseorang akan memiliki manfaat, nilai yang sesuai dengan apa yang diinginkan pemustaka.

Nilai dan manfaat tersebut dapat menambah pengetahuan, memberikan hiburan, kepuasan bahkan menimbulkan rasa bangga pada diri seseorang. Mengembangkan minat dan respon masyarakat untuk berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan secara maksimal diperlukan kesadaran diri bukan paksaan. Sehingga dengan berprinsip mengunjungi perpustakaan dapat memaksimalkan fungsi dan merasakan manfaat dari perpustakaan. Faktor-faktor tersebut dapat terpelihara melalui sikap-sikap, bahwa di dalam diri tertanam komitmen dengan berkunjung ke perpustakaan merupakan kebutuhan hidup dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta keterampilan.

Menurut Febriani (2015: 33)¹² hal-hal yang mempengaruhi jumlah kunjungan, diantaranya:

1. Pelayanan yang meliputi keramahan, kecepatan, keakuratan/ kesesuaian informasi yang diberikan, dan bimbingan (pemanduan) kepada pengunjung.
2. Sarana prasarana, yang meliputi ketersediaan akan kelayakan fasilitas

¹² Febriani, Yusni. (2015). Minat Kunjung Dosen ke UPT. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang

yang mendukung kelancaran aktifitas

3. Daya tarik tempat yang di kunjungi
4. Keamanan yang meliputi ketenangan dan kenyamanan pengunjung selama berada di tempat yang di kunjungi.

Tingkat kunjungan masyarakat per hari dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan per hari dibagi jumlah penduduk. Banyaknya pemustaka menunjukkan tingkat kemanfaatan perpustakaan. Banyaknya pemustaka di Perpustakaan Umum Kota sebanyak 671 orang, pemustaka di Perpustakaan Umum Kecamatan 288 orang, pemustaka di Perpustakaan Umum Kelurahan 2.301 orang, pemustaka di Perpustakaan Khusus 251 orang, pemustaka di Perpustakaan SD/MI 14.112 orang, pemustaka di Perpustakaan SMP/MTS 6.144 orang, pemustaka di Perpustakaan SMA/SMK/MA 6.804orang, dan pemustaka di Perpustakaan Perguruan Tinggi 12.390 orang.

Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari di Kota Semarang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan Per Hari
Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Masyarakat Per Hari
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	671
Perpustakaan Umum Kecamatan	288
Perpustakaan Umum Kelurahan	2.301
PERPUSTAKAAN KHUSUS	215
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	14.112
SMP/MTS	6.144
SMA/SMK/MA	6.804
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	12.390

IFLA memberikan standar tingkat kemanfaatan perpustakaan (kunjungan masyarakat) ada 2% dari total penduduk. Rasio Kunjungan

Masyarakat Per Hari di Perpustakaan Umum Kota ada 0,000397, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan Umum Kecamatan 0,000171, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan Umum Kelurahan 0,001363, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan Khusus 0,000237, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan SD/MI 0,127330, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan SMP/MTS 0,144023, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan SMA/SMK/MA 0,336465. Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari Perpustakaan di Perguruan Tinggi ada 0,051797. Secara total Skor UPLM4 ada 0,1993668. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kemanfaatan perpustakaan pada semua jenis perpustakaan belum memenuhi standar IFLA karena masih kurang dari standar yang telah ditetapkan oleh IFLA ada 2%.

Rasio kunjungan masyarakat ke perpustakaan per hari di Kota Semarang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Rasio Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari
Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	0,000397
Perpustakaan Umum Kecamatan	0,000171
Perpustakaan Umum Kelurahan	0,001363
PERPUSTAKAAN KHUSUS	0,000237
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	0,127330
SMP/MTS	0,144023
SMA/SMK/MA	0,336465
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	0,051797
SKOR UPLM4	0,1993668

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

kunjungan ke perpustakaan diantaranya, yaitu:

1. Mengadakan promosi perpustakaan
2. Menyediakan halaman perpustakaan di internet
3. Membuat beragam kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi perpustakaan seperti perlombaan mengumpulkan artikel.
4. Melengkapi fasilitas yang ada di perpustakaan.
5. Menambah koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap saat
6. Menyusun anggaran perpustakaan dengan tepat dan bijak
7. Memberikan pelatihan kepustakaan kepada pustakawan serta menambah tenaga pustakawan yang punya kemampuan kelebihan dan loyalitas dalam bekerja.
8. Menempatkan posisi perpustakaan di tempat yang strategis.

Beberapa upaya pemenuhan standar nasional perpustakaan yang perlu dilakukan agar perpustakaan mampu memberikan pelayanan yang optimal sehingga mampu menarik minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan yaitu:

1. Meningkatkan pemenuhan koleksi perpustakaan baik dari segi jenis maupun jumlah koleksi, melakukan pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, perawatan koleksi, maupun pelestarian koleksi.
2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan meliputi: lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan perpustakaan.
3. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik sistem dan jenis layanan, waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
4. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga perpustakaan, baik kepala perpustakaan, pustakawan maupun tenaga perpustakaan.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan.

4.6 Rasio Perpustakaan yang Dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (UPLM-5)

Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan adalah perpustakaan yang sudah dibina sesuai dengan SNP, memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik terakreditasi maupun belum terakreditasi. Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.

Perpustakaan diharapkan dapat memenuhi standar nasional Perpustakaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, standar nasional perpustakaan mencakup:

a. Standar koleksi perpustakaan

Standar koleksi perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:

1) Jenis koleksi

Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi. Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal. Koleksi nonfiksi perpustakaan sekolah/madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala. Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu. Selain koleksi tersebut, perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

2) Jumlah koleksi

Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan umum atau perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul. Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Jumlah koleksi, harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

3) Pengembangan Koleksi

Pengembangan koleksi harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan

penyiangan bahan perpustakaan. Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

4) Pengolahan Koleksi

Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku. Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

5) Perawatan Koleksi

Perawatan koleksi harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala. Perawatan koleksi meliputi penyimpanan dan konservasi.

6) Pelestarian Koleksi

Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi melakukan pelestarian koleksi deposit. Perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

b. Standar sarana dan prasarana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014, sarana dan prasarana yang harus disediakan meliputi: Lahan, Gedung, Ruang, Perabot, dan Peralatan. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas. Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang. Lahan perpustakaan harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman. Gedung atau ruang perpustakaan harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan. Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan. Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki. Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan

dan informasi. Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan. Perpustakaan yang telah memiliki sarana tersebut, dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi untuk: pengelolaan koleksi; penyelenggaraan pelayanan; pengembangan perpustakaan; dan kerja sama perpustakaan.

c. Standar pelayanan perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014, waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan. Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi. Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen. Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat. Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.

1) Sistem Pelayanan

Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem pelayanan perpustakaan tersebut ditentukan oleh setiap perpustakaan. Kedua sistem pelayanan ini ada hubungannya dengan cara bagaimana perpustakaan memberikan kesempatan kepada pemustaka untuk menemukan koleksi dan informasi yang mereka butuhkan. Masing-masing sistem pelayanan perpustakaan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Berikut ini penjelasannya.

a) Sistem Pelayanan Terbuka (Open Access)

Sistem pelayanan ini memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk mencari dan menemukan secara langsung koleksi perpustakaan dan sumber informasi yang ia perlukan. Tujuan sistem

pelayanan terbuka adalah memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk mendapatkan koleksi seluas-luasnya, tidak hanya sekedar membaca-baca, tetapi juga mengetahui berbagai alternatif pilihan koleksi yang ada di rak, yang kira-kira dapat mendukung penelitiannya atau memenuhi kebutuhan informasinya. Kekurangan dari sistem ini adalah susunan buku dalam rak menjadi sulit teratur.

b) Sistem Pelayanan Tertutup (*Close Access*)

Pada sistem pelayanan tertutup, pemustaka tidak boleh secara langsung mencari dan mengambil koleksi dari rak. Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang akan mencarikan dan mengambil koleksi dari rak. Kelebihan dari sistem pelayanan tertutup ini adalah susunan dan letak buku terpelihara, dan tidak perlu ada petugas khusus untuk mengawasi pengguna. Sementara itu kekurangannya antara lain: kebebasan melihat buku tidak ada, harus dicari melalui katalog. Ketersediaan buku juga terkadang tidak ada padahal dalam katalog ada, sehingga harus memilih lagi sampai berulang-ulang.

Dengan menggunakan sistem ini, pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan akan lebih sibuk bekerja karena harus bergerak terus mencari koleksi yang diperlukan pemustaka di rak, terlebih pada saat pemustaka banyak berkunjung, misalnya saat menjelang ujian siswa dan mahasiswa. Pada saat-saat seperti itu, banyak sekali pemustaka yang mencari koleksi dan memerlukan bantuan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan menelusur informasi yang mereka butuhkan. Penerapan sistem pelayanan tertutup mengharuskan pemustaka mencari dan mencatat data bibliografis serta nomor panggil koleksi yang ia butuhkan. Pencarian dan penelusuran data bibliografis tersebut dapat menggunakan berbagai sarana temu kembali informasi, seperti: katalog, indeks, bibliografi, dan sebagainya.

2) Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, terdapat dua jenis pelayanan perpustakaan, yaitu:

a) Pelayanan teknis

Pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan. Pelayanan teknis yang mencakup pengembangan koleksi, pengolahan koleksi perpustakaan dan pelestarian koleksi perpustakaan.

b) Pelayanan Pemustaka

Pelayanan pemustaka berkaitan dengan pelayanan jasa yang diberikan perpustakaan. Pelayanan pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi, dengan penjelasan dibawah ini.

(1) Pelayanan Sirkulasi

Pelayanan sirkulasi (circulation services) adalah pelayanan perpustakaan berupa pemberian pelayanan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan, seperti buku dan koleksi perpustakaan lainnya, dalam jumlah dan kurun waktu tertentu. Pelaksanaan pelayanan sirkulasi dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain. Pelayanan sirkulasi dilakukan pada sistem layanan terbuka. Pada pelayanan sirkulasi ini dilakukan proses peminjaman bahan pustaka yang boleh dipinjam, penentuan jangka waktu peminjaman, pengembalian bahan pustaka yang dipinjam dan pembuatan statistik peminjaman untuk membuat laporan perpustakaan.

Jenis koleksi yang dipinjamkan biasanya terbatas kepada bahan tercetak saja. Tetapi ada juga perpustakaan yang meminjamkan bahan-bahan non buku seperti kaset audio, kaset video dan lain-lain. Bahan tercetakpun tidak semua dipinjamkan. Jenis bahan pustaka yang lazim dipinjamkan adalah buku teks. Ada juga perpustakaan yang meminjamkan majalah-majalah lama. Peminjamannya biasanya terbatas kepada anggota perpustakaan. Masyarakat luar yang bukan anggota biasanya tidak boleh meminjam. Mereka hanya diperbolehkan membaca di tempat. Jangka waktu peminjaman bervariasi antara perpustakaan yang satu dengan perpustakaan yang lain. Begitu juga antara kelompok buku yang satu dengan kelompok buku yang lain. Umumnya perpustakaan meminjamkan koleksi

bukunya selama dua minggu untuk jenis koleksi buku biasa dan satu malam untuk buku-buku tandon (*reserved collection*).

(2) Pelayanan Referensi

Menurut Hutchins (1944)¹³, pelayanan referensi itu adalah layanan yang bersifat pribadi dan langsung bagi mereka yang mencari informasi di perpustakaan untuk berbagai tujuan, dan juga bermacam kegiatan perpustakaan yang bertujuan menyediakan informasi tersebut semudah mungkin. Menurut American Library Association (ALA), layanan referensi adalah sebagian layanan perpustakaan yang secara langsung berhubungan dengan pembaca dalam memberikan informasi dan penggunaan sumber-sumber perpustakaan untuk kepentingan studi dan penelitian. Adapun menurut Shores (1954) dalam Syihabuddin Qalyubi (2007)¹⁴, layanan referensi adalah bagian dari layanan perpustakaan yang tugasnya mengintegrasikan seluruh koleksi perpustakaan termasuk sumber-sumber diluar perpustakaan yang dapat digunakan.

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mempunyai tujuan dan pengertian yang sama yaitu kegiatan pelayanan perpustakaan untuk membantu pemakai perpustakaan menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi referensi serta memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi referensi. Pelayanan referensi mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka (secara langsung, melalui telepon atau elektronik), tidak terbatas untuk menjawab pertanyaan substantif, memberikan pengajaran kepada pemustaka dalam menyeleksi, menggunakan alat-alat dan strategi penelusuran yang sesuai untuk menemukan informasi, melakukan penelusuran dalam rangka memenuhi kebutuhan pemustaka, mengarahkan pemustaka ke sumber daya perpustakaan, membantu dalam

¹³ Hutchins, Margareth. Introduction to reference work. Chicago : American Library Association, 1944.

¹⁴ Syihabuddin Qalyubi, Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (Jogjakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2007)

evaluasi informasi, merujuk pemustaka kepada sumber daya di luar perpustakaan, membuat statistik referensi dan berpartisipasi dalam pengembangan koleksi referensi.

Jika dirinci lebih lanjut, maka layanan referensi yang diberikan perpustakaan bersifat langsung, artinya dalam memberikan layanan itu betul-betul berhubungan langsung dengan para pemakai terutama dalam memberikan informasi. Layanan referensi memberikan informasi kepada pemakai baik informasi kepada pemakai baik informasi yang sifatnya ilmiah untuk kepentingan studi dan penelitian maupun informasi yang sifatnya tidak ilmiah. Dalam memberikan informasi, petugas dapat dengan leluasa menggunakan sumber-sumber baik yang ada di perpustakaan sendiri maupun yang ada diluar perpustakaan. Layanan referensi bertujuan untuk membantu para pembaca/ pemakai perpustakaan dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan yang ada dengan sebaik-baiknya.

d. Standar Tenaga Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014, Standar Tenaga Perpustakaan mencakup kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Selain tenaga perpustakaan, perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan, dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional

atau lembaga akreditasi. Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi, dan akan menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier pustakawan.

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya. Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tenaga nonpustakawan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.

Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang perpustakaan. Kapabilitas merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan. Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan dan pengalaman bekerja di perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun. Integritas merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang perpustakaan. Kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan. Dalam hal tidak terdapat pustakawan, kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.

e. Standar Penyelenggaraan

Standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Standar penyelenggaraan perpustakaan

mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.

f. Standar Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014, standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai: perencanaan; pelaksanaan; dan pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perencanaan meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan. Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi. Pengawasan perpustakaan meliputi: supervisi; evaluasi; dan pelaporan. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

Berikut ini regulasi yang mengatur standar nasional perpustakaan masing-masing jenis perpustakaan, yaitu:

1. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota
2. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan
3. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah

Tsanawiyah

7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi

Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP berjumlah 127 perpustakaan. Perpustakaan yang telah dibina sesuai SNP pada perpustakaan umum Kota sebanyak 1 perpustakaan, Perpustakaan umum Kecamatan sebanyak 1 perpustakaan, Perpustakaan umum kelurahan sebanyak 48 perpustakaan, dan perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 27 perpustakaan. Pembinaan terhadap Perpustakaan Umum Komunitas, Taman Bacaan, Rumah Pintar atau sejenisnya hanya 1 perpustakaan. Pembinaan terhadap perpustakaan SD/MI hanya 169 perpustakaan, dan pembinaan terhadap perpustakaan SMP/MTs sebanyak 32 perpustakaan.

Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Jumat Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP
Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan dibina Sesuai SNP
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	1
Perpustakaan Umum Kecamatan	1
Perpustakaan Umum Kelurahan	48
PERPUSTAKAAN KHUSUS	5

Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan dibina Sesuai SNP
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	169
SMP/MTS	32
SMA/SMK/MA	24
Pondok Pesantren	0
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	27
JUMLAH TOTAL	307

Rasio Perpustakaan yang telah dibina sesuai SNP pada Perpustakaan Umum Kota ada 1,000000, pada Perpustakaan Umum Kecamatan 0,062500, pada Perpustakaan Umum Kelurahan ada 0,271186, perpustakaan SD/MI ada 0,335317, SMP/MTS ada 0,166667, SMA/SMK/MA 0, 126984, Perpustakaan Perguruan Tinggi ada 0,457627. Sementara itu pada Perpustakaan Khusus ada 0,116279 karena belum dilakukan pembinaan sesuai SNP. Secara total Skor UPLM 5 ada 1,343685. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pembinaan perpustakaan sesuai SNP agar perpustakaan di Kota Semarang secara bertahap dapat meningkatkan pemenuhan standar nasional perpustakaan, khususnya pada perpustakaan umum Perpustakaan Umum Kelurahan, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan SD/MI, Perpustakaan SMP/MTS, dan Perpustakaan SMA/SMK/MA.

Rasio perpustakaan yang dibina sesuai SNP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Rasio Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP
Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Rasio Perpustakaan dibina Sesuai SNP
Perpustakaan Umum Kota	1,000000
Perpustakaan Umum Kecamatan	0,062500
Perpustakaan Umum Kelurahan	0,271186

Jenis Perpustakaan	Rasio Perpustakaan dibina Sesuai SNP
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	0,116279
Perpustakaan SD/MI	0,335317
Perpustakaan SMP/MTS	0,166667
Perpustakaan SMA/SMK/MA	0,126984
Perpustakaan Perguruan Tinggi	0,457627
SKOR UPLM 5	1,343685

4.7 Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM-6)

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan merupakan jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh perpustakaan. Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Perpustakaan Umum Kota Semarang sebanyak 1.587 orang, Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Perpustakaan Umum Kecamatan ada 1.664 orang, dan Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Perpustakaan Umum Kelurahan Kota Semarang ada 5.841. Sedangkan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Perpustakaan Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA secara berturut-turut adalah 14.112 orang, 6.144 orang, 6.804 orang. Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Perpustakaan perguruan Tinggi ada 33.158 orang, dan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Perpustakaan Khusus Kota Semarang ada 645 orang.

Tabel 4.12
Jumat Masyarakat yang Terlibat dalam Sosialisasi Perpustakaan Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Jumlah Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan
PERPUSTAKAAN UMUM	

Jenis Perpustakaan	Jumlah Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan
Perpustakaan Umum Kota	1.587
Perpustakaan Umum Kecamatan	1.664
Perpustakaan Umum Kelurahan	5.841
PERPUSTAKAAN KHUSUS	645
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	14.112
SMP/MTS	6.144
SMA/SMK/MA	6.804
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	33.158

Rasio keterlibatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi perpustakaan Umum Kota ada 0,000940; Perpustakaan Kecamatan ada 0,000986; Perpustakaan Kelurahan ada 0,003450. Rasio keterlibatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi perpustakaan sekolah antara lain SD/MI ada 0,127330; SMP/MTs ada 0,144023; SMA/SMK/MA ada 0,336465; Perguruan Tinggi ada 0,138620; Perpustakaan Khusus ada 0,000710. Secara total skor UPLM-6 ada 0,228077.

Rasio keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13
Rasio Masyarakat yang Terlibat dalam Sosialisasi Perpustakaan Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Rasio Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	0,000940
Perpustakaan Umum Kecamatan	0,000986
Perpustakaan Umum Kelurahan	0,003460
PERPUSTAKAAN KHUSUS	0,000710
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	0,127330
SMP/MTS	0,144023
SMA/SMK/MA	0,336465
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	0,138620
UPLM-6	0,228077

Kedepan peningkatan sosialisasi mengenai perpustakaan kepada masyarakat, siswa dan mahasiswa perlu dilakukan. Sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi terkait perpustakaan bertujuan untuk mempresentasikan sekaligus membuka pengetahuan masyarakat akan peran dan manfaat perpustakaan, pentingnya menumbuhkan serta meningkatkan minat baca.

Sosialisasi terkait perpustakaan diharapkan akan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya membaca sejak dini serta dampaknya dalam peningkatan kualitas hidup. Selain itu sosialisasi juga akan meningkatkan pemanfaatan potensi perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Dengan adanya keinginan, minat dari tiap orang maka akan menjadi bekal bagi mereka untuk belajar mandiri, serta mampu memanfaatkan informasi, dan pengetahuan yang diperolehnya.

4.8 Rasio Anggota Perpustakaan (UPLM-7)

Jumlah anggota perpustakaan di Kota Semarang di Perpustakaan

Umum ada 21.599 orang, di Perpustakaan Umum Kecamatan ada 379 189 orang, di Perpustakaan Umum Kelurahan ada 1.947 orang, di Perpustakaan Khusus ada 3.440 orang, di Perpustakaan SD/MI ada 90.720 orang, di Perpustakaan SMP/MTS ada 21.888 orang, Perpustakaan SMA/SMK/MA ada 23.814 orang, dan di Perpustakaan Perguruan Tinggi ada 152.161 orang. Jumlah anggota perpustakaan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.14
Jumlah Anggota Perpustakaan (Pemustaka Yang Terdaftar)
Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Jumlah Pemustaka Yang Terdaftar
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	21.599
Perpustakaan Umum Kecamatan	379
Perpustakaan Umum Kelurahan	1.947
PERPUSTAKAAN KHUSUS	
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	90.720
SMP/MTS	21.888
SMA/SMK/MA	23.814
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	
	152.161

Rasio Anggota Perpustakaan (Pemustaka yang Terdaftar) dihitung dari jumlah pemustaka yang terdaftar dibagi jumlah penduduk. Tingkat engagement menjadi indikator penting dalam melihat keaktifan masyarakat dalam memanfaatkan informasi yang tersedia di Perpustakaan. Rasio Pemustaka yang Terdaftar pada Perpustakaan Umum Kota ada 0,012795, Perpustakaan Umum Kecamatan ada 0,000225, Perpustakaan Umum Kelurahan ada 0,001153, Perpustakaan Khusus ada 0,003789, Perpustakaan SD/MI ada 0,818551; Perpustakaan SMP/MTS ada 0,513080; Perpustakaan SMA/SMK/MA ada 1,177628; Perpustakaan Perguruan Tinggi ada 0,636122.

Secara total Skor UPLM-7 ada 0,712849. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio pemustaka terdaftar masih rendah pada semua jenis perpustakaan, baik Perpustakaan Umum Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan, Perpustakaan Umum Kelurahan, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan SD/MI, Perpustakaan SMP/MTS, Perpustakaan SMA/SMK/MA, maupun Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Rasio anggota perpustakaan di Kota Semarang disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Rasio Anggota Perpustakaan (Pemustaka Yang Terdaftar)
Kota Semarang

Jenis Perpustakaan	Rasio Pemustaka Yang Terdaftar
PERPUSTAKAAN UMUM	
Perpustakaan Umum Kota	0,012795
Perpustakaan Umum Kecamatan	0,000225
Perpustakaan Umum Kelurahan	0,001153
PERPUSTAKAAN KHUSUS	0,003789
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH	
SD/MI	0,818551
SMP/MTS	0,513080
SMA/SMK/MA	1,177628
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI	0,636122
UPLM-7	0,712849

4.9 Hasil IPLM Kota Semarang

Literasi memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Kesadaran berliterasi akan mengantarkan sebuah peradaban pada kedudukan yang terhormat. Bangsa yang literate adalah bangsa yang mampu menjawab tantangan zaman. Sebaliknya, bangsa yang tidak literate akan menjelma menjadi sebuah bangsa

lemah. Bangsa lemah ini tidak akan pernah mampu merespon tantangan dan rintangan di masa depan.

Literasi sendiri secara sederhana diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, literasi mempunyai arti kemampuan memperoleh informasi dan menggunakannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Peradaban yang berliterasi selalu ditandai dengan kepedulian yang tinggi terhadap perpustakaan. Perpustakaan selalu menjadi transportasi literasi ketika suatu peradaban mencapai puncak keemasan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang peradaban manusia tidak dapat lepas dari perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Nilai IPLM berada pada rentang angka 0-100. Nilai IPLM Kota Semarang Tahun 2024 pada angka 71,58 yang artinya berada pada kategori sedang.

Hasil perhitungan IPLM yang diperoleh dari tujuh unsur pembangun literasi masyarakat disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.16
Hasil Perhitungan IPLM Kota Semarang

No	Unsur Pembangun Literasi Masyarakat	Indeks
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,005707
2	Tingkat Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	2,266981
3	Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,012116
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	0,199368
5	Rasio Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	1,343685
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	0,228077
7	Rasio Anggota Perpustakaan (UPLM7)	0,954812

	IPLM	71,5821
--	-------------	---------

5.1. Simpulan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan. Pengukuran IPLM Kota Semarang agar dapat diketahui kondisi mengenai jenis perpustakaan baik pada aspek koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, gedung, hingga pelayanan pemustaka. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengukuran IPLM Kota Semarang sebagai berikut:

1. Ketersediaan perpustakaan di Kota Semarang perlu ditingkatkan, khususnya perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum kelurahan, dan perpustakaan khusus.

Hal ini terlihat dari Ketersediaan perpustakaan di Kota Semarang perlu ditingkatkan, khususnya perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum kelurahan, dan perpustakaan khusus. Rasio ketersediaan Perpustakaan Umum Kota ada 0,0000029 perpustakaan per penduduk, Rasio ketersediaan Perpustakaan Umum Kecamatan 0,000009 perpustakaan per penduduk, Rasio ketersediaan Perpustakaan Umum Kelurahan 0,0000105 perpustakaan per penduduk, Rasio ketersediaan Perpustakaan Khusus 0,000047 perpustakaan per penduduk. Rasio ketersediaan Perpustakaan SD/MI 0,004548; Rasio ketersediaan Perpustakaan SMP/MTS 0,004501 perpustakaan per penduduk, Rasio ketersediaan Perpustakaan SMA/SMK/MA 0,009346 perpustakaan per penduduk, Rasio ketersediaan Perpustakaan Perguruan Tinggi 0,000247 perpustakaan per penduduk. Secara keseluruhan Skor UPLM1 ada 0,005707. Secara keseluruhan Skor UPLM-1 (Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan) sebesar 0,005707.

2. Ketersediaan koleksi perpustakaan pada perpustakaan umum kota,

perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum kelurahan, perpustakaan khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi belum memenuhi standar yang dikeluarkan oleh IFLA/UNESCO karena kurang dari 2 judul per orang. Sementara itu pada perpustakaan sekolah telah memenuhi standar IFLA/UNESCO karena telah mencapai 2 judul per orang. Hal ini terlihat dari Rasio Ketersediaan Koleksi Perpustakaan pada Perpustakaan Umum Kota sebanyak 0,030879 judul per orang, Perpustakaan Umum Kecamatan sebanyak 0,001431 judul per orang, Perpustakaan Umum Kelurahan sebanyak 0,007759 judul per orang, Perpustakaan Khusus sebanyak 0,003220 judul per orang, Perpustakaan SD/MI sebanyak 1,819002 judul per orang, Perpustakaan SMP/MTS sebanyak 3,091983 judul per orang, Perpustakaan SMA/SMK/MA sebanyak 2,308525 judul per orang, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebanyak 0,023508 judul per orang. Secara total Skor UPLM-2 Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan ada 2,266981.

3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan perlu ditingkatkan, khususnya pada perpustakaan umum Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan, Perpustakaan Umum Kelurahan, Perpustakaan Khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi.

Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan pada Perpustakaan Umum Kota ada 0,000020 orang per penduduk, Perpustakaan Umum Kecamatan ada 0,000028 orang, Perpustakaan Umum Kelurahan ada 0,000315 orang, Perpustakaan Khusus ada 0,000075 orang per penduduk, Perpustakaan SD/MI ada 0,009095 orang per penduduk, Perpustakaan SMP/MTS ada 0,009001 orang per penduduk, Perpustakaan SMA/SMK/MA ada 0,006389 orang per penduduk, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi ada 0,020275 orang per penduduk. Secara total Skor UPLM-3 ketercukupan Tenaga Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 ada 0,012116.

4. Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan pada semua jenis perpustakaan belum memenuhi standar IFLA karena masih kurang dari standar yang telah ditetapkan oleh IFLA sebesar 2%.

Hal ini terlihat dari Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan Umum Kota ada 0,000397, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan Umum Kecamatan 0,000171, Rasio Kunjungan Masyarakat

Per Hari di Perpustakaan Umum Kelurahan 0,001363, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan Khusus 0,000237, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan SD/MI 0,127330, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan SMP/MTS 0,144023, Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari di Perpustakaan SMA/SMK/MA 0,336465. Rasio Kunjungan Masyarakat Per Hari Perpustakaan di Perguruan Tinggi ada 0,051797. Secara total Skor UPLM-4 ada 0,1993668.

5. Pembinaan perpustakaan sesuai SNP perlu ditingkatkan, khususnya pada perpustakaan umum Perpustakaan Umum Kelurahan, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan SD/MI, Perpustakaan SMP/MTS, dan Perpustakaan SMA/SMK/MA.

Hal ini terlihat dari rasio Perpustakaan yang telah dibina sesuai SNP pada Perpustakaan Umum Kota sebesar 1,000000, pada Perpustakaan Umum Kecamatan 1,000000, pada Perpustakaan Umum Kelurahan sebesar 0,384615, perpustakaan SD/MI sebesar 0,002268, SMP/MTS sebesar 0,265957, Perpustakaan Perguruan Tinggi sebesar 1,000000. Sementara itu pada Perpustakaan Khusus dan perpustakaan SMA/SMK/MA sebesar 0,000000 karena belum dilakukan pembinaan sesuai SNP. Secara total Skor UPLM-5 (Rasio Perpustakaan yang telah dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan) sebesar 2,168929.

6. Rasio masyarakat yang mengikuti sosialisasi perpustakaan perlu ditingkatkan terutama pada perpustakaan umum kota, perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum kelurahan, perpustakaan khusus, perpustakaan SD/MI, Perpustakaan SMP/MTS, dan Perpustakaan SMA/SMK/MA. Hal ini terlihat dari Rasio keterlibatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi perpustakaan Umum Kota ada 0,000940; Perpustakaan Kecamatan ada 0,000986; Perpustakaan Kelurahan ada 0,003450. Rasio keterlibatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi perpustakaan sekolah antara lain SD/MI ada 0,127330; SMP/MTs ada 0,144023; SMA/SMK/MA ada 0,336465; Perguruan Tinggi ada 0,138620; Perpustakaan Khusus ada 0,000710. Secara total skor UPLM-6 ada 0,228077.
7. Rasio pemustaka terdaftar masih rendah pada semua jenis perpustakaan, baik Perpustakaan Umum Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan,

Perpustakaan Umum Kelurahan, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan SD/MI, Perpustakaan SMP/MTS, Perpustakaan SMA/SMK/MA, maupun Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Hal ini terlihat dari Rasio Pemustaka yang Terdaftar pada Perpustakaan Umum Kota ada 0,012795, Perpustakaan Umum Kecamatan ada 0,000225, Perpustakaan Umum Kelurahan ada 0,001153, Perpustakaan Khusus ada 0,003789, Perpustakaan SD/MI ada 0,818551; Perpustakaan SMP/MTS ada 0,513080; Perpustakaan SMA/SMK/MA ada 1,177628; Perpustakaan Perguruan Tinggi ada 0,636122. Secara total Skor UPLM-7 ada 0,712849.

8. Nilai IPLM Kota Semarang pada angka 71,5821 yang artinya berada pada kategori sedang.

5. 2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai berikut:

- (a). Meningkatkan ketersediaan perpustakaan di Kota Semarang, khususnya perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum kelurahan, dan perpustakaan khusus, melalui upaya koordinasi, advokasi dan pembinaan kepada kecamatan, kelurahan, perangkat daerah atau instansi pemerintah daerah yang belum memiliki perpustakaan untuk menyediakan perpustakaan.
9. Meningkatkan ketersediaan koleksi perpustakaan pada perpustakaan umum kota, perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum kelurahan, perpustakaan khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi melalui:
 - a. Meningkatkan koordinasi, advokasi dan pembinaan kepada kecamatan, kelurahan, perangkat daerah dan perguruan tinggi untuk mengalokasikan anggaran untuk penambahan koleksi perpustakaan.
 - b. Memberikan bantuan koleksi perpustakaan kepada perpustakaan yang koleksi perpustakaannya kurang.
 10. Meningkatkan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, khususnya pada perpustakaan umum Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan, Perpustakaan Umum Kelurahan, Perpustakaan Khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi melalui:

- a. Meningkatkan koordinasi, advokasi dan pembinaan kepada kecamatan, kelurahan, perangkat daerah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan jumlah tenaga perpustakaan.
 - b. Melakukan bimbingan teknis/pelatihan bagi SDM pengelola perpustakaan.
11. Meningkatkan Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari pada semua jenis perpustakaan, baik Perpustakaan Umum Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan, Perpustakaan Umum Kelurahan, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan SD/MI, Perpustakaan SMP/MTS, Perpustakaan SMA/SMK/MA, maupun Perpustakaan Perguruan Tinggi, melalui:
- a. Meningkatkan pemenuhan koleksi perpustakaan baik dari segi jenis maupun jumlah koleksi, melakukan pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, perawatan koleksi, maupun pelestarian koleksi.
 - b. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan meliputi: lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan perpustakaan.
 - c. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik sistem dan jenis